

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pacitan

1. Letak dan Kondisi Geografis



Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Pacitan

Sumber : Dokumen Bappeda diakses melalui (Bappeda.go.id), 2014

Secara geografis, Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan salah satu dari 38 Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan barat daya. Kabupaten Pacitan terletak di antara $110^{\circ} 55'$ - $111^{\circ} 25'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 55'$ - $8^{\circ} 17'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah $1.389,8716 \text{ Km}^2$ atau $138.987,16 \text{ Ha}$. Luas tersebut sebagian besar berupa perbukitan yaitu kurang lebih 85%, gunung-gunung kecil lebih kurang 300 buah menyebar diseluruh wilayah Kabupaten Pacitan dan jurang terjal yang termasuk dalam deretan Pegunungan

Seribu yang membujur sepanjang selatan Pulau Jawa, sedang selebihnya merupakan dataran rendah.

Kabupaten Pacitan terletak di Pantai Selatan Pulau Jawa dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pintu gerbang bagian barat dari Jawa Timur dengan kondisi fisik pegunungan kapur selatan yang membujur dari Gunung Kidul ke Kabupaten Trenggalek menghadap ke Samudra Indonesia. Adapun wilayah administrasi terdiri dari 12 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 166 Desa. Batas-batas administrasi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri
4. Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki sumber daya alam dan sumberdaya manusia yang potensial. Keberagaman sumberdaya yang ada dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Oleh karena itu, perlu adanya inovasi dan kreativitas dari masyarakat Kabupaten Pacitan dalam pemanfaatan lingkungan agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat (Pacitankab.go.id, 2017)

2. Penduduk

Berikut ini adalah data berdasarkan jumlah keseluruhan Kecamatan di Kabupaten Pacitan:

Tabel 6. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pacitan Tahun 2013

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1.	Donorojo	16,562	18,337	34,899	90,32
2.	Punung	16,107	17,706	33,813	90,97
3.	Pringkuku	14,234	15,681	29,915	90,77
4.	Pacitan	37,250	39,259	76,509	94,88
5.	Kebonagung	20,622	21,888	42,510	94,22
6.	Arjosari	19,006	20,050	39,056	94,79
7.	Nawangan	22,491	23,486	45,977	95,76
8.	Bandar	21,088	21,391	77,807	98,58
9.	Tegalombo	24,031	24,840	45,598	96,74
10.	Tulakan	38,495	39,312	77,807	97,92
11.	Ngadirojo	22,362	23,236	45,598	96,24
12.	Sudimoro	15,164	15,319	30,483	98,99
Jumlah		267,412	280,505	547,917	98,99

Sumber: Dokumen BPS Kabupaten Pacitan Dalam Angka, 2013

3. Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Pacitan merupakan wilayah yang memiliki potensi pada sumberdaya alamnya. Kondisi fisik serta topografi Kabupaten Pacitan yang terdiri dari daerah pegunungan dan perbukitan, serta wilayah pantai atau laut, menyimpan banyak potensi di beberapa sektor diantaranya adalah pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, perdagangan serta jasa. Jika dilihat dari luas wilayahnya, sektor pertanian masih berpotensi menjadi keunggulan Kabupaten Pacitan. Namun, sebagian besar petaninya masih bersifat informal atau belum tercatat. Padahal jika dilihat, luas lahannya mencapai 120.000 Ha, 90% adalah lahan pertanian.

Kabupaten Pacitan juga mempunyai banyak potensi di sektor kelautan dan perikanan, pertambangan, kehutanan dan juga sektor pariwisata. Pada sektor

kelautan dan perikanan juga mengalami kenaikan dalam pengembangan maupun pemanfaatannya. Sektor ini juga akan menjadi potensi bagi pengembangan wilayah khususnya pada wilayah pesisir. Berikut adalah potensi pengembangan dari setiap sektor, diantaranya adalah:

1. Kawasan Pertanian

Kabupaten Pacitan merupakan Kabupaten yang kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Banyak wilayah di sekitar pusat kota maupun daerah di luar yang masih menjadi lahan pertanian. Pada tahun 2014, sebanyak 48,89% produksi tanaman pertanian mengalami kenaikan dibanding pada tahun sebelumnya. Selain pertanian juga terdapat tanaman perkebunan. Pada tahun 2014 jumlah produksi tanaman perkebunan fluktuatif. Sebanyak 20 jenis tanaman, sekitar 70% mengalami kenaikan jumlah produksi dibandingkan pada tahun sebelumnya.

2. Kawasan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan kawasan kelautan dan perikanan pada beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan produksi. Produksi dibedakan atas perikanan darat dan perikanan laut.

3. Kawasan Industri

Jumlah Industri yang ada di Kabupaten Pacitan tahun 2014 baik Industri besar. Industri sedang dan Industri kecil adalah 10.917 unit Industri di Kabupaten Pacitan sudah mulai mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jenis industri kecil yang paling banyak adalah industri kecil yaitu sebesar 99,84%, industri besar sebesar 00,04% sedangkan sisanya adalah industri

sedang yang hanya 0,12%. Bila dilihat menurut status dari industri kecil dan Kerajinan, sebesar 97,14% adalah Industri kecil dan non formal, sedangkan sisanya 2,86% yang mampu menyerap tenaga kerja sebesar 22.832 orang yang mampu menyerap tenaga kerja 1.616 orang dengan 667 tenaga kerja (Pacitankab.go.id)

4. Visi dan Misi Kabupaten Pacitan

Visi Kabupaten Pacitan:

“MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT”

Misi Kabupaten Pacitan:

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi dapat dirumuskan menjadi alasan mengapa organisasi ada. Suatu alasan menjelaskan jati diri yang sesungguhnya dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan pengertian di atas, maka misi Kabupaten Pacitan 2016-2021 (Pacitankab.go.id), sebagai berikut:

Misi Pertama : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan Akuntabel

Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat

Misi Ketiga : Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai

Misi Keempat : Meningkatkan kesalehan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisan masyarakat

B. Gambaran Umum Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro merupakan unsur pelaksana bidang Koperasi, Usaha Mikro, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja dan transmigrasi meliputi koperasi, usaha mikro, pembiayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, serta tugas pembantu yang diberikan kepada Kabupaten (Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021).

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembiayaan;
- d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tenaga kerja dan transmigrasi;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan terdiri atas:

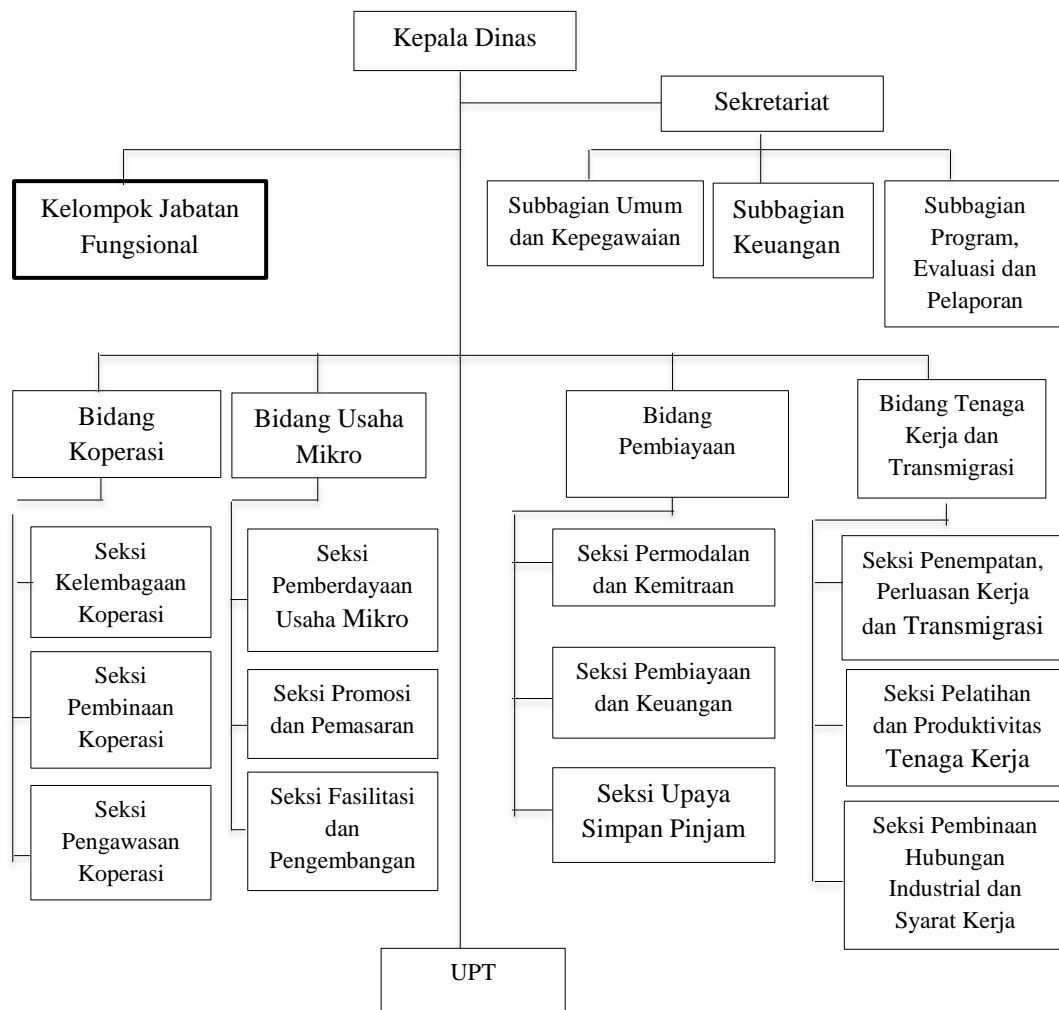
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang Koperasi
 - a. Seksi Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Koperasi
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro
 - a. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro
 - b. Seksi Promosi dan Pemasaran
 - c. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Usaha
5. Bidang Pembiayaan
 - a. Seksi Permodalan dan Kemitraan
 - b. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan
6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Seksi Penempatan, Perluasan, Kerja dan Transmigrasi
 - b. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

c. Seksi Pembinaan Hubungan Industri dan Syarat Kerja

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. UPT Dinas

Secara lengkap bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dalam Gambar 5. sebagai berikut



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan

Sumber: Dokumen Renstra 2016-2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2. Sumber Daya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan

Kepegawaian

Pada pelaksanaan tugas dan kewajiban, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan didukung oleh 55 orang terdiri dari:

1. Berdasarkan Status Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah	%
1.	PNS	42	76.37
2.	Non PNS	13	23.63
3.	Total	55	100

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2016

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah	%
1.	Laki-Laki	28	50.90
2.	NON PNS	27	49.10
3.	TOTAL	55	100

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2016

3. Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah	%
1.	Pasca Sarjana	3	10.44
2.	Sarjana	31	49.25
3.	Diploma	4	5.98
4.	SLTA	22	32.83
5.	SLTP	-	-
6.	SD	1	1.50
Jumlah		55	100

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2016

4. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah	%
1.	Golongan IV	4	8.70
2.	Golongan III	38	82.60
3.	Golongan II	4	8.70
4.	Golongan I	-	-
Total		46	100

Sumber: Dokumen Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, 2016

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang mencerminkan harapan yang dicapai, dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2016-2021, maka Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro yang Mandiri dan Berdaya Saing”

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya terkandung upaya dan peran Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kabupaten Pacitan dalam mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Mandiri dan berdaya saing;

2. Mandiri adalah kondisi yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa banyak menggantungkan kepada pihak lain;
3. Berdaya saing artinya kondisi Koperasi dan UMKM yang mampu berkompetensi dengan pelaku Koperasi dan UMKM yang lain secara sehat,

Diharapkan dengan terumusya Visi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing (Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021)

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi, maka Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan 2016-2021 (Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2016-2021) adalah sebagai berikut;

1. Memberdayakan Koperasi dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing;
2. Mengembangkan pola kemitraan, jaringan usaha dan informasi dalam rangka peningkatan daya saing;
3. Mewujudkan Iklim Ketenagakerjaan yang kondusif, Pengembangan Perluasan Lapangan Kerja dan Kesempatan Berusaha;
4. Mewujudkan kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Transmigrasi

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah menunjukkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan untuk dicapai Tahun 2016-2021 (Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 2016-2021) sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan
- b. Terciptanya jaringan kerja UMKM
- c. Terwujudnya Koperasi yang berkualitas
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja/Buruh dan Transmigran
- e. Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dan berkembangnya peluang lapangan kerja dan kesempatan Ketenagakerjaan.

2. Sasaran

- a. Tumbuhnya wirausaha
- b. Terjalinnnya kemitraan dengan pihak ketiga
- c. Terciptanya kelembagaan Koperasi yang berkualitas dan terciptanya usaha koperasi yang sehat
- d. Meningkatkan penanganan dan pelayanan Kesejahteraan Pekerja/Buruh
- e. Meningkatnya penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAN, AKAD dan AKI
- f. Meningkatkan perlindungan hukum bagi tenaga kerja utamanya; penerapan norma K3 di perusahaan agar tercapai *zero accident* (angka kecelakaan nihil)

C. Gambaran Umum Kecamatan Ngadirojo

Kecamatan Ngadirojo dulu terkenal dengan sebutan Lorok. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Pacitan, memiliki luas wilayah sebesar 95,91 Km² dengan jumlah penduduk 49.490 jiwa yang terdiri dari 24.300 penduduk laki-laki dan 25.102 penduduk wanita. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari 33% dataran rendah, 9% landau, 38% dering dan 20% terjal yang berupa gunung dan perbukitan khas pegunungan kapur.

Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari 18 Desa, 95 Dusun, 148 Rukun Warga (RW) dan 435 Rukun Tetangga (RT), dengan kepadatan penduduk 516,4 jiwa/Km². Berikut adalah 18 Desa yang berada Kecamatan Ngadirojo:

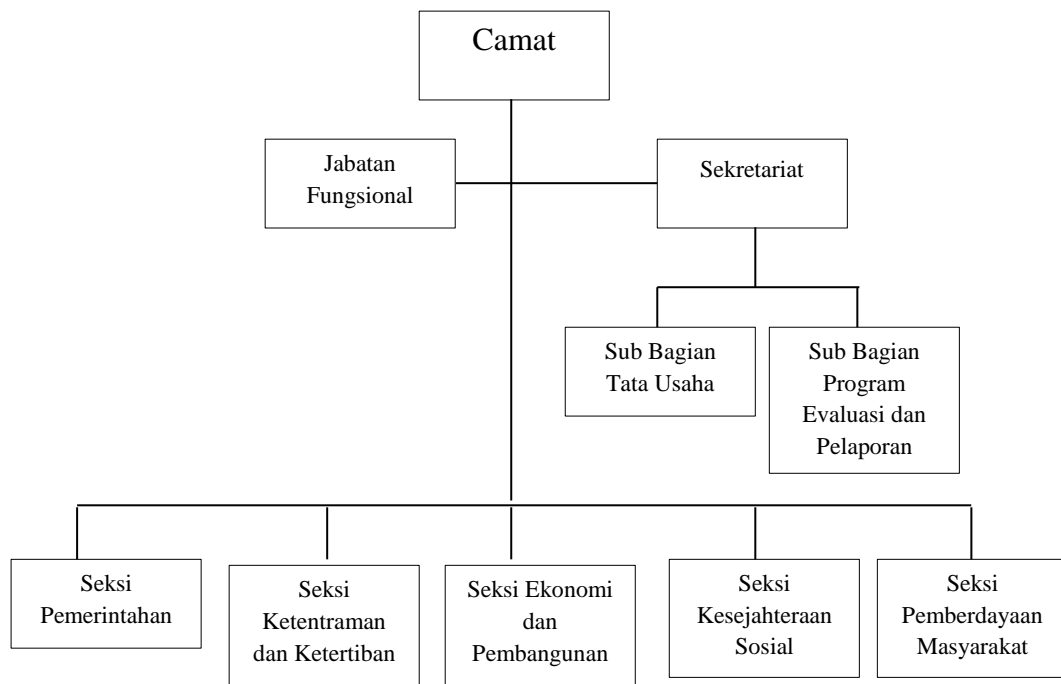
1. Desa Sidomulyo
2. Desa Hadiwarno
3. Desa Hadiluwih
4. Desa Tanjungpuro
5. Desa Pagerejo
6. Desa Wiyoro
7. Desa Ngadirojo
8. Desa Bogoharjo
9. Desa Cokrokembang
10. Desa Bodag
11. Desa Tanjung Lor
12. Desa Nogosari

13. Desa Cangkring
14. Desa Wonodadikulon
15. Desa Wonodadiwetan
16. Desa Wonokarto
17. Desa Wonosobo
18. Desa Wonosari

Batas-batas dari Kecamatan Ngadirojo:

- a. Sebelah timur: Kecamatan Sudimoro
- b. Sebelah utara: Kecamatan Slahung, Kab. Ponorogo
- c. Sebelah Barat: Kecamatan Tulakan
- d. Sebelah Selatan: Samudra Indonesia (Pacitankab.go.id)

Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2007.



Gambar 7. Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan

Sumber: Dokumen Profil Kecamatan Ngadirojo diakses melalui (pacitankab.go.id), 2007

D. Penyajian Data

1. Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Lorok Pacitan

a. Memrakarsai dan Menyepakati Suatu Proses Perencanaan Strategis

Tahap pertama dalam proses perencanaan strategis bertujuan untuk menegosiasikan kesepakatan dengan orang-orang pembuat keputusan. Pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) batik Lorok terdapat beberapa aktor yang terlibat diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai lembaga pembina dan pelaksana, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pendamping, swasta

dan pelaku usaha. Batik Lorok sebagai salah satu produk unggulan UMKM di Pacitan harus terus bisa meningkatkan kualitas produk yang inovatif, memiliki akses pemasaran yang luas dan menciptakan usaha yang bersifat mandiri. Sebagai upaya mewujudkannya maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki strategi dalam mengembangkan usaha mikro batik Lorok Pacitan dalam hal:

1. Pengembangan Kemampuan UMKM

Tingkat kemampuan di dalam pengembangan setiap usaha mikro pada berbagai bidang di Kabupaten Pacitan tentunya berbeda-beda. Hal ini dapat dinilai pada tingkat pendapatan, tingkat produksi dan cara pemasaran. Batik Lorok sebagai salah satu UMKM unggulan di Kabupaten Pacitan diharapkan memiliki kemampuan berkembang yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Pengembangan kemampuan UMKM terdapat dalam Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2011-2016, dengan mewujudkan usaha mikro yang mandiri dan tangguh. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan kemampuan UMKM berperan sebagai pelayan publik dan pendamping usaha. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Ya begini, pemerintah di dalam meningkatkan pengembangan kemampuan dari UMKM yang dibina itu meliputi dua aspek mbak, yaitu pelayanan dan pendampingan usaha. Pada aspek pelayanan dimulai dari perijinan yang meliputi ijin usaha, legalitas usaha dan hak paten produk. Kita sebagai pemerintah yang menaungi usaha-usaha kecil ini memberikan kemudahan, kita bantu dari mulai proses pendaftaran usaha, legalitas serta hak paten yang kemudian dikirimkan ke Provinsi. Selain itu kita juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya legalitas, hak paten dan segala hak intelektualnya karena kalau kita lihat usaha-usaha kecil ini ya bikin usaha langsung saja dan langsung dipasarkan secara luas tanpa

memperhatikan proses pembuatan usaha yang baik mbak. Oleh karena itu kita masih terus mengupayakan dan mensosialisasikan hal tersebut terutama pada usaha yang baru berdiri. Kemudian untuk pendampingan usaha meliputi pelatihan, pemasaran dan permodalan. Kita mendampingi mereka, ya apa yang menjadi kemampuan mereka kita tingkatkan jika diibaratkan yang awalnya nilainya 50 persen kita tingkatkan menjadi 70 persen sampai nanti ke 100 persen gitu mbak.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 09.27 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa di dalam pengembangan kemampuan UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sebagai pelayan publik dan pendamping usaha. Pelayanan publik dilakukan dari mulai sosialisasi mengenai perijinan dan hak paten serta membantu usaha-usaha baru untuk pengurusan administrasi pendaftaran usaha, legalitas serta hak paten yang kemudian akan dikirimkan ke Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi. Sosialisasi difokuskan pada usaha-usaha baru karena untuk mencegah adanya usaha yang tidak terdaftar secara resmi atau usaha ilegal. Kemudian pada pendampingan usaha, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan berperan dalam mendampingi usaha-usaha mikro kecil yang terdiri dari pelatihan, pemasaran dan permodalan. Sebagai organisasi publik, pemerintah membantu usaha-usaha kecil ini dapat mengoptimalkan kemampuan secara terus meningkat sehingga dapat berkembang secara maksimal. Pelayanan publik dapat dikatakan baik jika mampu dirasakan oleh yang dilayani, yaitu para pengusaha kecil salah satunya adalah pengusaha batik Lorok. Hal ini disampaikan oleh Ibu Sumiatin selaku pemilik tempat produksi Batik Lorok Puri Putri, sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur mbak, Puri Putri ini sangat dibantu oleh pemerintah. Di awal usaha saya, saya hanya ikut ibu saya yang punya produksi Puri kemudian saya disaranin oleh Diskoperindag waktu itu

untuk memproduksi batik sendiri. Di awal produksi yang hanya beberapa potong, saya diajak pameran dan semua laku mbak. Mulai dari situ saya mendirikan bendera sendiri mbak. Untuk proses pembuatan izin usaha dan semua proses administrasi saya sangat dibantu oleh Dinas dan tidak ada biaya apapun, dan sampai saat ini saya masih diajak pameran di berbagai daerah dan banyak diberi bantuan berupa modal dan alat produksi mbak. Saat ini omset saya mencapai 89 juta dan pegawai saya ada 55 orang”
(Wawancara 4 Mei 2017 pukul 11.30 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa para pelaku usaha batik Lorok merasa sangat dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah. Mulai pembuatan izin usaha dimana segala proses administrasi diurus oleh pemerintah, bantuan modal dan pemberian informasi terkait pinjaman, bantuan alat produksi dan bantuan promosi ke berbagai daerah. Segala kemudahan dalam kepengurusan perizinan memberikan dampak pada peningkatan jumlah UMKM dan wirausaha baru. Hal ini terbukti pada capaian kinerja akhir tahun 2016 pada evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) untuk jumlah UMKM (unit) pada tahun 2016 mencapai 104,37 % atau 23.170 unit dan mengalami peningkatan sebesar 972 unit dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu 22.013 unit. Kemudian untuk peningkatan wirausaha baru indikator kinerja peningkatan jumlah wirausaha baru (%) pada tahun 2016 sebesar 5,25 % atau mencapai 328,12% dari target RPJMD tahun 2016.

Pada pendampingan usaha yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan berhasil jika usaha-usaha tersebut mampu menginovasikan produknya sebagai bentuk tingkat kemampuan yang tinggi. Salah satu usaha yang mampu menginovasikan produk adalah batik Lorok produksi Tengah Sawah. Berikut hasil

wawancara dengan Ibu Toni Retno selaku pemilik tempat produksi batik Lorok Tengah Sawah, sebagai berikut:

“Saya dengan teman-teman pengrajin batik di Lorok ini ingin berinovasi mbak, tidak hanya kain saja namun ingin merambah ke produk lainnya yaitu pembuatan tas. Pembuatan tas dari kain batik ini diharapkan mampu menarik konsumen dan memberikan pilihan lain ketika membeli disini. Sementara pemasarannya disini mbak, soalnya batik Tengah Sawah kan ada bloknya ya untuk memudahkan saja kita kasih disini. Harga yang kita tawarkan itu 700.000 mbak. Ya cukup mahal soalnya kainnya saja juga sudah mahal mbak. Tapi responnya sejauh ini bagus kok mbak, pembelinya kebanyakan orang luar daerah yang sudah tahu kualitas batik kita juga.” *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 14.40 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Tengah Sawah)*



Gambar 8. Inovasi Pembuatan Tas Motif Batik Lorok

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Berdasarkan wawancara dengan pemilik salah satu tempat produksi batik Lorok Tengah Sawah bahwa bentuk pengembangan kemampuan dari pengrajin batik Lorok adalah inovasi terhadap produk. Beberapa pemilik produksi batik Lorok bekerjasama dalam pengembangan kain batik untuk dijadikan produk lainnya seperti tas. Inovasi tersebut dilakukan untuk memberikan pilihan bagi konsumen agar tidak hanya kain saja yang dipasarkan. Harga yang ditawarkan pun mulai dari Rp 700.000,00, meskipun mahal namun peminatnya sudah cukup

banyak dari kalangan konsumen luar daerah yang sudah mengenal kualitas dari batik Lorok itu sendiri. Selain untuk memberikan pilihan kepada konsumen, pembuatan tas dari kain batik Lorok ini juga dapat mempererat kerjasama di antara semua pengrajin batik Lorok dalam peningkatan produksi dan mutu produk batik tersebut.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam pengembangan suatu UMKM. Pada era globalisasi seperti ini, sumberdaya manusia dituntut untuk mampu menjadi makhluk sosial yang adaptif dan transformatif. Sumberdaya manusia diperlukan dalam mendukung terciptanya UMKM dengan daya saing dan kualitas tinggi, baik pada aspek manusianya maupun produksinya. Peningkatan sumberdaya manusia diwujudkan dengan pelatihan, pengembangan dan motivasi. Oleh karena itu, diharapkan SDM dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam perkembangan usaha mikro. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana dari strategi peningkatan SDM memiliki beberapa program kegiatan salah satunya adalah perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan. Produk unggulan UMKM Kabupaten Pacitan adalah batik, oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memperluas industri batik melalui pelatihan ke desa-desa yang berminat dengan adanya batik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

“Peningkatan SDM untuk usaha mikro batik khususnya batik Lorok dilakukan oleh masing-masing tempat produksi dan dibina langsung oleh pemilik produksi. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik Lorok dinilai sudah mampu dan menguasai pada proses pembatikan. Untuk tahun ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan berfokus pada pemerataan lapangan usaha dengan produk unggulannya adalah batik. Ya

seperti yang kita tahu kalau produksi batik ini masih sangat sedikit dan itu berada jauh dari pusat kota. Untuk itu pemerintah berupaya untuk mewujudkannya dengan program dan kegiatannya adalah menciptakan usahawan baru di bidang batik. Program ini memiliki semboyan yaitu “Tidak Ada Menjadi Ada”. Hal ini diharapkan dapat memunculkan industri-industri baru dimana fokus utamanya adalah pada desa yang berminat dan dinilai mampu menggerakkan warganya untuk ikut dalam pelatihan. Jadi dari desa yang tidak ada produksi batik, kita latih untuk bisa dan dapat memproduksi batik khas Pacitan sendiri dan sejauh ini sudah berjalan dengan baik” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 10.45 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam peningkatan SDM untuk usaha mikro batik khususnya batik Lorok dilakukan oleh masing-masing tempat produksi dan dibina langsung oleh pemilik produksi. Hal ini dikarenakan para pengusaha batik Lorok dinilai sudah mampu dan menguasai pada proses pembatikan. Oleh karena itu, pengusaha batik Lorok seringkali berkontribusi dalam program yang dilakukan pemerintah khususnya pada pelatihan dasar pembatikan. Di tahun ini, berdasarkan tujuan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang dimuat pada Rencana strategis 2011-2016 dan dilanjutkan pada Renstra tahun 2016-2021 yaitu terciptanya perluasan lapangan kerja berbasis pada produk unggulan, pemerintah memiliki program dan kegiatan yaitu memperluas pembinaan pada produk unggulan yaitu batik. Program ini akan berfokus pada menciptakan usahawan baru di bidang batik dengan target utamanya adalah pada tingkat desa. Sesuai dengan semboyannya yaitu “Tidak ada menjadi ada”, pemerintah berupaya memberikan sosialisasi dan pelatihan pada desa-desa yang tidak memiliki pengetahuan tentang dasar pembatikan yang diharapkan desa yang dilatih akan memunculkan usahawan baru di bidang batik.

Kontribusi yang dilakukan oleh pengusaha batik Lorok adalah membantu program dari pemerintah dalam memberikan pelatihan pada desa-desa yang menjadi sasaran dari pemerintah. Pengusaha batik Lorok dianggap telah mampu dalam melatih proses pembatikan. Hal ini dapat dilihat bahwa di dalam melatih para pegawainya sudah dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemilik produksi batik Lorok. Berikut hasil wawancara dari Ibu Sumiatin selaku pemilik batik Lorok Puri Putri sebagai berikut:

“Soal pelatihan pembatikan itu dilatih oleh masing-masing pemilik produksi batik Lorok sendiri mbak. Karena kita sudah menekuni pembatikan ini kan sudah lama sekali mbak, sebelum saya memiliki tempat usaha sendiri saya kan sudah ikut ibu saya jadi sudah pengalamanlah kan ya asal batik Lorok kan ya dari sini mbak. Ya karena itu saya dan teman-teman ikut dalam membantu pemerintah untuk melatih ke desa-desa yang memiliki minat tinggi dalam ikut pelatihan batik ini. Saya juga berharap mbak, produksi batik bisa terus bertambah dan kita bisa menjalin kerjasama dalam meningkatkan perkembangan batik, ya intinya kita bersama-sama lah untuk terus memasarkan batik khas Pacitan ini” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 11.42 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri*)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa sebagian besar tempat produksi batik Lorok di dalam memberikan pelatihan untuk para pegawainya dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pemilik produksi. Hal ini dikarenakan masing-masing pemilik produksi telah dianggap mampu dan menguasai proses pembatikan. Walaupun proses dari pembatikan selalu sama namun pada pola masing-masing tempat produksi pasti memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda-beda. Kemampuan inilah yang dinilai mampu membantu pemerintah dalam memberikan pelatihan pada masyarakat desa yang menjadi tujuan program pelatihan. Pelatihan ini dilakukan oleh para pemilik batik Lorok dengan sukarela dan berharap pelatihan yang dilakukan akan memberikan dampak yang baik dan

dapat memunculkan usahawan baru dibidang batik Pacitan. Adapun bukti dokumentasi saat pelatihan pematikan pada kegiatan pelatihan desa pada tanggal 22 Maret 2017 bertempat di Desa Sirnobojo Kabupaten Pacitan.



Gambar 9. Pelatihan Proses Pematikan

Sumber: Dokumentasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, 2017

3. Peningkatan Teknologi Pengetahuan

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini harus diimbangi dengan pengetahuan teknologi. Hal ini dikarenakan para pelaku usaha tidak bisa lagi hanya mengandalkan bakat alam atau talenta untuk memajukan usahanya. Para pelaku usaha dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Teknologi pengetahuan sangat dibutuhkan, salah satunya adalah dalam pemasaran produk. Oleh karena itu, sesuai dengan Rencana strategi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

berupaya memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait penggunaan teknologi. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Teknologi pengetahuan yang kita lakukan sejauh ini lebih ke pemasaran mbak. Sekarang ini kita fokus untuk memberikan edukasi tentang penggunaan internet, Jadi mereka bisa memasarkannya produknya lebih luas. Para pelaku usaha saat ini kan kebanyakan masih menggunakan pemasaran secara manual, yaitu pemasarannya mengandalkan pameran dan dari mulut ke mulut. Oleh sebab itu, kita dari pemerintah mengupayakan sosialisasi dan pemberian materi terkait penggunaan internet untuk pemasaran produk. Untuk prakteknya sendiri, kita akan bekerja sama dengan PT Telkomsel sebagai wujud dukungan untuk UMKM Indonesia yang diberi nama Kampung UKM *Goes Digital*. Fasilitas yang diberikan adalah penyediaan jaringan internet secara gratis dan pemberian sebuah komputer sebagai simbol kerja sama dengan pemerintah. Namun untuk pelaksanaannya masih terbatas pada dana dalam pembelian komputer dan tidak adanya ruang pelaksanaan mbak.”(*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Menurut hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pemerintah saat ini fokus dalam pemberian edukasi tentang penggunaan internet yang dimanfaatkan untuk pemasaran. Penggunaan internet bagi pelaku usaha UMKM masih sangat sedikit termasuk pada pengusaha batik Lorok. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha masih mengandalkan pemasaran secara manual, yaitu hanya promosi melalui pameran dan dari mulut ke mulut. Pemerintah mengupayakan sosialisasi dan pemberian materi terkait penggunaan internet untuk pemasaran produk. Selain pemberian materi, adanya praktek penggunaan komputer dan internet secara langsung juga sangat penting agar para pelaku usaha dapat lebih memahami dengan baik. Di dalam penerapannya, pemerintah bekerja sama dengan PT Telkomsel sebagai wujud dukungan untuk UMKM Indonesia yang diberi nama Kampung UKM *Goes Digital*. Fasilitas yang diberikan adalah

penyediaan jaringan internet secara gratis dan pemberian sebuah komputer sebagai simbol kerja sama dengan pemerintah. Namun untuk pelaksanaannya masih terbatas pada dana dalam pembelian komputer dan tidak adanya ruang pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Susilo selaku Seksi Fasilitasi dan Pengembangan Wirausaha Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Pemberian edukasi terkait tentang penggunaan teknologi yaitu internet, saat ini memang berencana untuk melakukannya bekerjasama dengan Telkomsel Indonesia. Ya tapi pelaksanaannya masih belum bisa karena terkendala dengan sarana dan prasarannya. Rencana ini sebetulnya sudah akan dilakukan di tahun ini, tapi ya gimana mbak kan sekarang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro belum ada gedung jadi masih ikut di gedung PLUT . Kemudian untuk komputernya sendiri masih ada satu saja. Jadi ya masih belum bisa dilaksanakan. *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 11.50 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan)*



Gambar 10. Rencana Sosialisasi Kampung UKM Goes Digital

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelatihan dan pemberian edukasi terkait penggunaan internet masih belum bisa dilaksanakan. Perencanaan mengenai pelatihan ini dalam

mewujudkan peningkatan teknologi pengetahuan yang bekerja sama dengan Telkomsel Indonesia sudah direncana sejak tahun 2016, namun belum bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana, gedung dan alat pelatihan yaitu komputer. Penyediaan komputer hanya terdapat satu perangkat yang diberikan oleh PT Telkomsel Indonesia. Oleh sebab itu, perlu adanya diskusi kembali tentang pelaksanaan dari Kampung UKM *Goes Digital* agar dapat segera dilaksanakan.

Penundaan pelaksanaan pelatihan bagi pelaku usaha mikro saat ini berdampak pada keterbatasan pengetahuan dalam penggunaan teknologi pengetahuan pada bidang pemasaran. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar UMKM Kabupaten Pacitan dalam pemasarannya masih bergantung pada pameran, memasarkan dari mulut ke mulut dan penjualannya dilakukan dirumah produksi masing-masing. Industri batik Lorok yang merupakan produk UMKM unggulan Kabupaten Pacitan dalam memasarkan produknya juga masih mengandalkan pameran, terbukti dari sepuluh tempat produksi batik di Lorok hanya terdapat satu tempat yang memiliki akses pemasaran menggunakan internet berupa blog pribadi yaitu produksi batik Lorok Tengah Sawah. Blog tersebut berisi tentang jenis kain dan motif yang diproduksi serta sejarah dari setiap motif yang diciptakan. Berikut tampilan blog dari Batik Tulis Tengah Sawah:



Gambar 11. Tampilan Blog Batik Tulis Tengah Sawah

Sumber: renotoni.blogspot.co.id, 2017

Gambar di atas merupakan salah satu cara pemasaran melalui internet yaitu dengan adanya blog pribadi dari batik tulis Tengah Sawah. Blog tersebut berisikan jenis dan motif batik, kemudian terdapat info penjualan dan cara pemesanannya. Blog milik Tengah Sawah ini terus diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini terbukti dari arsip yang berisikan tentang berbagai jenis motif batik yang diproduksi setiap bulannya sampai dengan tahun 2017. Berikut hasil wawancara dengan Ibu Toni Retno selaku pemilik tempat produksi Batik Tulis Tengah Sawah sebagai berikut:

“Untuk pemasaran secara individu ya utamanya masih ikut-ikutan pameran diluar kota mbak. Kalau untuk melalui internet, saya memiliki blog pribadi yang saya gunakan untuk membagikan informasi terkait batik yang saya jual. Diantaranya adalah informasi terkait motif, makna dari setiap motif pembuatan dan informasi terkait cara pemesanan. Blog ini saya buat dari tahun lalu mbak, yang ngajarin anak saya. Pemerintah dan Dinas sendiri sering memberikan sosialisasi terkait penggunaan internet untuk pemasaran produk kami, tapi ya gitu mbak saya dan teman-teman yang lain itu kalau cuma dikasih penjelasan gitu aja seringnya lupa ya makhlum mbak yang punya ini rata-rata sudah ibu-ibu.” *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 14.38 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Tengah Sawah)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa batik tulis tengah sawah dalam memasarkan produknya yaitu dengan cara manual yaitu pameran dan secara online yaitu menggunakan blog pribadi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memasarkan hasil produksinya agar dikenal masyarakat luas. Blog Batik Lorok Tengah Sawah memuat segala informasi terkait jenis, motif, makna dan arti setiap motif batik yang diproduksi oleh batik Tengah Sawah serta informasi terkait pemasaran. Pembuatan dari Blog Tengah Sawah dilakukan secara mandiri dan telah berjalan selama dua tahun. Para pemilik batik di Lorok telah mendapat pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan internet, namun belum efektif karena sebagian besar pemilik produksi sudah lanjut usia.

4. Akses Permodalan

Permodalan merupakan faktor utama yang dibutuhkan dalam pengembangan suatu unit usaha. Maka dari itu dibutuhkan suatu akses yang mudah bagi para pelaku usaha. Akses permodalan untuk usaha mikro berupa pinjaman. Pinjaman yang dapat diakses yaitu pinjaman dari pemerintah yaitu dari dana bergulir, kemudian dari BUMN yaitu dari PT. INKA dan juga pinjaman dari beberapa perbankan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Fadjar selaku staf Seksi Permodalan dan Kemitraan sebagai berikut:

“Dari segi permodalan ya, dari pemerintah daerah pelaksanaannya kan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, untuk masalah permodalan dari Pemda memberika fasilitas pinjaman dana bergulir dari APBD Kabupaten Pacitan. Pinjaman ini diperuntukkan bagi UKM, LKM dan Koperasi. Kemudian dari permodalan yang lain yaitu kemitraan dengan INKA (Indonesia Nasional Kereta Api), nah kita juga memfasilitasi itu. Syarat pinjaman untuk dana bergulir dari pemerintah penurut PerGub adalah yang pertama mereka punya usaha, kemudian yang kedua usahanya sudah berjalan satu tahun dan yang ketiga adalah mereka secara *continue* melaksanakan usahanya baik itu perdagangan maupun industri. Kalau

untuk syarat minimal pendapatan berapa itu tidak ada ya mbak, yang penting usahanya bersifat terus-menerus dan berkesinambungan. Untuk batik Lorok sendiri awalnya kita tawarkan untuk pinjaman dana bergulir dimana tidak ada bunga pinjamannya ya mbak, tapi sekarang sudah lunas. Kemudian sekarang kita tawarkan bermitra dengan INKA untuk lebih berkembang lagi,” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa permodalan untuk pinjaman usaha dapat melalui dana bergulir daerah dari APBD Kabupaten Pacitan yang diperuntukkan bagi UKM, LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan bisa bermitra dengan BUMN yaitu PT INKA. Berikut merupakan syarat pinjaman untuk dana bergulir dari pemerintah menurut Peraturan Gubernur sebagai berikut:

1. Mereka punya usaha
2. Usahanya sudah berjalan satu tahun
3. Secara *continue* melaksanakan usahanya baik itu perdagangan maupun industri.

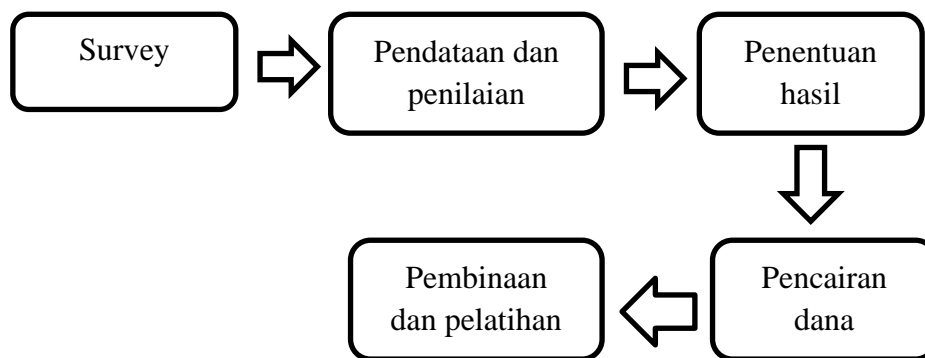
Pinjaman kedua yang ditawarkan oleh pemerintah daerah adalah pinjaman dari BUMN yaitu dari PT INKA (Indonesia Nasional Kereta Api). Pinjaman permodalan dari PT INKA memiliki sasaran yaitu usaha kecil maupun usaha pemula. Bunga pinjaman yang diberikan adalah dibawah 6 persen per tahun, sehingga jarang terjadi kasus penunggakan pembayaran angsuran. Hal ini diharapkan seluruh mitra binaan dapat memanfaatkan dana tersebut secara tepat guna. Adapun daftar UMKM batik Lorok yang bermitra dengan PT INKA sebagai berikut:

Tabel 7. Daftar Mitra Binaan PT INKA (Persero) Kabupaten Pacitan Tahun 2016

No.	Nama Produksi	Tahun Pinjaman
1.	Batik Tulis Puri	2013, 2016
2.	Batik Tulis Tengah Sawah	2013
3.	Batik Tulis Puri Putri	2013, 2016
4.	Batik Puspita	2013, 2016

Sumber: Dokumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, 2016

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terdapat empat usaha binaan dari bidang batik Lorok yang dibina oleh PT INKA. Keempat produksi diantaranya adalah Batik Tulis Puri, Batik Tulis Puri Putri, Batik Tulis Tengah Sawah Dan Batik Tulis Puspita. Tiga diantaranya masih menjadi usaha binaan di tahun 2016. Adapun proses pinjaman dari PT INKA sebagai berikut:



Gambar 12. Tahapan Pinjaman dari PT INKA

Sumber: Data Primer yang Diolah Peneliti, 2017

Berdasarkan gambar 12, terdapat lima tahapan pinjaman dari PT INKA yang harus dilalui. Pertama, survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT INKA bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM masing-masing pemerintahan daerah. Kedua, pendataan dan

penilaian sesuai dengan syarat dan ketentuan dari PT INKA. Ketiga, penentuan hasil dari survey, pendataan dan penilaian yang telah dilakukan. Keempat, beberapa badan usaha yang dinilai sesuai, dana akan disalurkan secara bertahap. Kelima, usaha binaan selain pemberian dana pinjaman akan dilatih dan diberi bimbingan tentang pengelolaan manajemen usaha keuangan dan marketing.

5. Pemasaran/ Promosi

Pemasaran suatu produk pada usaha mikro sangat penting dilakukan mengingat adanya pasar bebas dimana usaha mikro dan kecil dituntut mampu memasarkan produknya secara luas. Namun di dalam UMKM, proses pemasaran suatu produk masih menjadi masalah yang terus ada. Hal ini sulit dihilangkan karena selalu berhubungan dengan *mindset* atau cara berfikir para pelaku usaha. Para pengusaha yang khususnya adalah usaha mikro, enggan untuk mau memasarkan produknya secara global. Para pelaku usaha masih cenderung memasarkan produknya secara manual dari mulut ke mulut dan mengandalkan beberapa pameran dimana target pasarannya hanya kelompok tertentu. Oleh sebab itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat program dan kegiatan sesuai dengan Rencana strategis tahun 2011-2016. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sunaryo selaku Seksi Promosi dan Pemasaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Untuk pemasaran dan promosi, kita memiliki tujuan bahwa usaha mikro semuanya menjadi usaha mikro yang berdaya saing, mampu memasarkan produk mereka di daerah maupun diluar daerah. Oleh sebab itu, kita sebagai pemerintah memberikan program yaitu pemasaran secara global. Untuk mencapai program tersebut kita memiliki beberapa kegiatan yaitu pameran produk yang diadakan setiap tahunnya kemudian untuk

pemasaran batik Pacitan diadakannya peragaan busana, dimana kita bekerja sama dengan SMK Pacitan dalam kegiatan *fashion show* tersebut. Kalau promosi yang dilakukan masing-masing pemilik usaha termasuk batik Lorok masih sama sih mbak, masih mengikuti pameran yang diadakan di Pacitan maupun di luar daerah dan pemasarannya masih secara manual. Karena pengusaha ini cenderung susah untuk diajak maju mbak, mereka rata-rata hanya puas dengan beberapa pelanggan mereka sendiri. Nah itu yang masih kita usahakan untuk mengajak aktif dalam pemasaran namun bukan hanya para pengusaha saja tetapi adanya ikut serta dari pemuda kita untuk mau ikut memasarkan produk usaha mikro kita dengan cara yang mudah diterima oleh semua kalangan.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 08.52 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan Rencana strategi dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun 2011-2016 pada pemasaran dan promosi adalah adanya kegiatan pameran produk UMKM dan kegiatan peragaan busana. Pameran produk usaha mikro dilakukan setiap tahun dan didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pameran tersebut berisikan produk-produk asli Pacitan berupa hasil kerajinan, hasil olahan dan makanan khas. Selain itu, adanya kegiatan peragaan busana dimana pemerintah bekerja sama dengan SMKN Pacitan yang memiliki jurusan tata busana. Pada peragaan busana yang diadakan setiap acara hari jadi Kabupaten Pacitan, jurusan tata busana SMKN Pacitan diharuskan mengkreasikan kain batik Pacitan menjadi berbagai model busana yang unik dan menarik. Kegiatan peragaan busana tersebut diharapkan mampu menjadi daya tarik masyarakat Pacitan dan masyarakat luas lainnya untuk lebih mengenal dan mau menggunakan batik-batik dari Pacitan. Berikut dokumentasi pada acara pameran UMKM dan peragaan busana pada tahun 2017 yang berlokasi di Alun-Alun Pacitan:



Gambar 13. Pameran UMKM dan Peragaan Busana SMKN Pacitan

Sumber: Dokumentasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Pacitan, 2017

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa mengacu pada Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di dalam promosi dan pemasaran adalah adanya kegiatan pameran dan peragaan busana. Namun pada pelaksanaannya, kedua kegiatan tersebut belum sesuai dengan tujuan yang ada yaitu meningkatkan penjualan produk-produk Pacitan yang salah satunya adalah batik Lorok. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Ibu Sumiatin selaku pemilik produksi Puri Putri sebagai berikut:

“Kalo Puri Putri ini kan berdirinya juga masih beberapa tahun mbak, jadi masih suka ikut pameran dan undangan dari Dinas. Dari situ saya mendapatkan konsumen lumayan banyak. Untuk produksi sendiri ya di rumah ini mbak, pemasarannya juga di rumah saja. Kalau untuk pemasaran secara online ya dibantu Dinas mbak, belum punya sendiri. Ya dari Dinas kemudian dikasi nomor WA saya gitu aja. *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 11.42 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri, Ngadirojo Pacitan)*”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar produksi batik Lorok belum menggunakan media *online* sebagai metode pemasaran. Hal ini disebabkan para pelaku masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sebagai penghubung dalam memasarkan produknya. Tempat pemasarannya pun masih terbatas di rumah sendiri dengan memanfaatkan ruang

kosong. Jika dilihat semua tempat produksi batik Lorok berada diberbagai Desa yang jaraknya jauh dari produksi satu ke produksi lainnya dan ada beberapa tempat yang sulit untuk dijangkau. Kemudian letak Kecamatan Ngadirojo sendiri sebagai setra produksi batik Lorok berjarak 40 km dari pusat kota Pacitan. Hal ini menunjukkan bahwa media promosi secara *online* seharusnya dapat menjadi salah satu metode yang menguntungkan untuk pemasaran produk. Berikut merupakan salah satu tempat produksi batik tulis yaitu Puri Putri yang berada di Desa Cokrokembang Kecamatan Ngadirojo:



Gambar 14. Tempat Produksi Batik Tulis Puri Putri

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

6. Pengembangan Sarana Usulan dan Pemasaran

Pengadaan suatu sarana usulan bagi pelaku usaha bertujuan agar para pelaku usaha kecil dan mikro memiliki suatu tempat pelayanan yang bisa membantu dalam pengembangan maupun mengatasi suatu masalah atau kendala. Sarana usulan dan pemasaran disediakan dari pemerintah sebagai upaya mengatasi dan meminimalisasi permasalahan yang timbul pada suatu badan usaha. Seperti

yang disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro sebagai berikut:

“Sarana usulan dan pemasara yang saat ini sudah berjalan adalah adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT. PLUT sendiri itu adalah lembaga yang menyediakan jasa non-finansial untuk membantu permasalahan yang dihadapi koperasi maupun usaha mikro kita mbak. Pengadaan sarana ini memang ditujukan bagi para usaha-usaha yang ada di Kabupaten Pacitan untuk datang dan menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam pengembangan ataupun dalam pemasaran. Jika ada kelompok suatu usaha ingin memanfaatkan gedung tersebut kita juga sudah menyediakan, nanti teman-teman dari pendamping akan ikut membantu dan mendukung acara. Kemudian untuk sarana pemasaran, kita ada tempat yang juga telah berjalan mbak yakni sarana Pasar Sawo. Pasar Sawo ini digunakan sebagai wadah dalam memasarkan seluruh produk UKM Pacitan, tempat ini sudah berjalan mau 3 bulan, dan hasilnya masih belum maksimal sih mbak, karena ya mungkin minat mereka yang kurang.” (*Hasil wawancara peneliti pada 3 Juli 2017 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)



Gambar 15. Gedung Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PLUT)

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas bahwa sarana usulan dan pemasaran yang telah berjalan adalah adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT). PLUT ini merupakan suatu lembaga yang menyediakan jasa non-finansial untuk membantu permasalahan yang dihadapi koperasi maupun usaha mikro. Pengadaan sarana ini memang ditujukan bagi para usaha-usaha yang ada di

Kabupaten Pacitan untuk datang dan menyampaikan apa yang menjadi kendala dalam pengembangan ataupun dalam pemasaran. Selain itu, gedung PLUT juga dapat dimanfaatkan oleh para kelompok usaha untuk keperluan pengembangan usaha dimana akan dibantu oleh para pendamping usaha. Kemudian adanya tempat pemasaran yang ditujukan untuk produk-produk UKM Pacitan termasuk kerajinan batik tulis Lorok. Namun dalam pelaksanaannya, kedua sarana untuk usulan dan pemasaran masih terkendala beberapa permasalahan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Smito selaku staff pendamping PLUT sebagai berikut:

” Kalo untuk penggunaan dari PLUT ini ya mbak tingkat keberhasilannya masih kecil karena terkendala banyak aspek, salah satunya adalah biaya pengelolaan. Kita terbatas pada aspek itu mbak, kalo mau kita buat jadi galeri ya tidak ada nilai ekonomisnya. Kalo kita buat untuk pelatihan juga terbatas tempatnya, karena sekarang dibagi dengan kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ya kan Dinas belum ada gedung baru setelah pemisahan dengan Industri dan perdagangan. Memang benar fasilitas sudah siap seperti meja, kursi dan lemari pameran sudah memadai tapi ya itu mbak untuk pengelolaannya yang masih terbatas.” *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 10.00 WIB Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT))*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan dari adanya pusat layanan untuk usaha mikro masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini disebabkan karena keterbatasan biaya pelaksanaan, kemudian adanya pemindahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ke gedung PLUT karena belum adanya gedung baru. Tersedianya tempat layanan usulan bagi pelaku usaha seharusnya dapat memberikan kemudahan bagi pemilik usaha karena disediakan fasilitas yang baik. Namun untuk mewujudkannya perlu adanya kerjasama pemerintah dengan para pelaku usaha Kabupaten Pacitan agar

pusat layanan yang disediakan pun dapat dimanfaatkan dengan baik. Adapun hasil dokumentasi terkait fasilitas yang ada di dalam gedung PLUT sebagai berikut:



Gambar 16. Fasilitas di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa di dalam gedung telah tersedia berbagai fasilitas penunjang seperti meja, kursi, lemari pameran. Selain itu, ada staff pendamping yang siap untuk membantu para pelaku usaha yang membutuhkan informasi ataupun saran pengembangan serta mendampingi dalam sosialisasi dan pelatihan. Pemerintah daerah sangat berupaya dalam pengembangan dari usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Pacitan. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan fasilitas sarana promosi, berupa gedung pusat kerajinan dari seluruh pengusaha UMKM yang ada di Kabupaten Pacitan. Gedung yang bernama “Pasar Sawo” digunakan oleh para pelaku usaha untuk memasarkan hasil kerajinan diantaranya adalah kerajinan gerabah, olahan kayu, batik Pacitan, akik dan batu mulia dan olahan ikanan laut. Berikut adalah gedung Pasar Sawo Kabupaten Pacitan:



Gambar 17. Gedung Pemasaran UMKM

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

Pengadaan sarana usulan dan pemasaran yaitu PLUT dan Gedung Pasar Sawo belum dirasakan manfaatnya oleh semua pemilik usaha mikro terutama usaha mikro batik Lorok. Hal ini disebabkan karena masih minimnya minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana dari pemerintah tersebut. Oleh karena itu para pemilik usaha juga enggan menaruh produknya. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Toni selaku pemilik tempat produksi Batik Lorok Pacitan sebagai berikut:

“Pemerintah telah menyediakan sarana bagi kita dalam memasarkan produk. Akan tetapi saya sendiri merasa bahwa minat masyarakat dalam penggunaan batik Pacitan masih sangat rendah mbak. Pada awal peresmian gedung itu masih sangat antusias mbak namun lama kelamaan makin sepi. Akhirnya saya balik lagi dirumah saja jualnya ya karena hasil yang saya dapat tidak sesuai dengan transportnya .” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 15.00 di Tempat Produksi Batik Lorok Tengah Sawah, Ngadirojo Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas gedung Pasar Sawo adalah tempat dikumpulkannya semua hasil kerajinan yang ada di Kabupaten Pacitan. gedung ini dianggap sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi pengusaha karena adanya fasilitas untuk memasarkan produknya. Namun antusias dari para pengrajin tidak dibarengi dengan antusias masyarakat Pacitan padahal jika dilihat letak gedung

Pasar Sawo berada di sebelah alun-alun Kabupaten Pacitan. Hal ini disebabkan harga yang lebih mahal dan jenis produk yang lebih sedikit dibandingkan membeli di tempat produksi langsung. Oleh karena itu, masyarakat lebih memilih membeli di tempat produksi yang lebih terjangkau dan memiliki produk pilihan yang lebih beragam.

b. Memperjelas Mandat Organisasi

Mandat organisasi dapat dijabarkan sebagai suatu tugas atau kewajiban yang dimiliki organisasi. Suatu mandat menjadi pembatas atas apa yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan suatu organisasi. Sesuai dengan penjelasan di atas maka terdapat dua mandat organisasi yang ada pada Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yaitu rencana meningkatkan perlindungan konsumen dan rencana peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

1. Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Salah satu rencana dalam dokumen Rencana strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang masuk dalam tahapan memperjelas mandat organisasi dari teori Bryson yang pertama adalah rencana meningkatkan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan tugas penting dari pemerintah sebagai wujud melindungi konsumen dari hal-hal yang nantinya dianggap merugikan. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana, wajib untuk memberikan rasa aman bagi konsumen dan masyarakat. Hal yang perlu dijaga dan dilindungi meliputi keseimbangan harga, produk yang

aman dan tidak menggunakan bahan berbahaya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Smito selaku Staff Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai berikut:

“Perlindungan konsumen untuk produk batik berupa pemilihan bahan yang aman untuk dipakai dan tidak berbahaya. Jadi ya gitu mbak, kita sebagai pengawas hanya mengawasi berbagai produk UMKM yang beredar di masyarakat, baik tidak aman atau tidak. Kan dulu ada penelitian mbak ya tentang memakai baju dengan bahan berbahaya akan memicu kelumpuhan. Makanya bentuk perlindungannya ya itu lebih kepada pemakaian bahan produksi yang tidak berbahaya. Kalau untuk kestabilan harga ya kita tidak bisa soalnya tergantung dengan kualitas bahan dan biaya produksi dari masing-masing. Kita tidak bisa menyuruh suatu produk dijual dengan harga yang terjangkau tetapi pada pembiayaan produksi yang tinggi. Kan jadinya nanti rugi mbak ya” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 22 Juni 2017 pukul 10.10 WIB di Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT)*)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa di dalam perlindungan konsumen Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang didampingi oleh Bagian Pendamping PLUT sebagai pelaksana strategi tersebut menjelaskan bahwa perlindungan yang dilakukan berupa pengecekan bahan baku pembuatan batik. Mulai dari kain, pewarna alami maupun pewarna sintetis dan pengecekan alat produksi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam membeli produk UMKM batik Lorok Pacitan. Kemudian untuk perlindungan konsumen pada aspek kestabilan harga tidak dilakukan karena hal tersebut sudah diatur oleh masing-masing pemilik produksi batik. Pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tidak berkewajiban mengontrol harga dari semua produk UMKM mengingat biaya produksi yang berbeda juga. Perlindungan konsumen berupa pengecekan bahan dan alat produksi juga disampaikan oleh Ibu Sumiatin selaku pemilik Batik Lorok Puri Putri sebagai berikut:

“Jadi pada awal berdirinya Puri Putri ini, dari Dinas melakukan pengecekan mbak, mereka datang langsung kesini. Pengecekannya dilakukan bertahap, datang pertama itu pengecekan bahan-bahan pembuatan batik lalu dilakukan uji lab. Kemudian pengecekan tempat pengolahan limbah sudah sesuai atau belum. Dan pada bulan-bulan selanjutnya masih dikontrol ya mbak waktu itu. Setelah tiga bulan, mereka kesininya 3 bulan sekali saja.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 4 Mei 2017 pukul 13.00 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri Ngadirojo Pacitan*)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa untuk pengecekan bahan pada tempat usaha batik di awal berdirinya dilakukan secara bertahap dan dilakukan pengontrolan setiap bulanya. Pengecekan yang dilakukan adalah pengecekan bahan pembuatan batik. Kemudian pengecekan yang kedua adalah pengecekan tempat pengolahan limbah dimana harus sesuai dan berada di wilayah produksi karena bahan yang digunakan tidak berbahaya maka limbah yang dihasilkan berupa inpal sejauh ini tidak mencemari lingkungan produksi. Setelah dikontrol selama tiga bulan, maka untuk pengecekan selanjutnya dilakukan setiap tiga bulan sekali saja.

2. Meningkatkan Penggunaan Produk dalam Negeri

Memperjelas mandat organisasi yang kedua dari Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah rencana peningkatan produk dalam negeri. Sistem perdagangan yang semakin terbuka dengan masuknya produk-produk Cina dan Asean lainnya secara bebas (ACFTA) yang membuat masing-masing negara dituntut untuk mengoptimalkan sumber dayanya dalam menghasilkan produk-produk inovatif dan dapat bersaing di pasar lokal maupun global. Adanya otonomi daerah, daya saing Negara bertumpu pada daya saing daerah sehingga perlu dikembangkan kompetensi inti daerah, dimana dapat membantu pembangunan

daerah berbasis sumberdaya unggulan. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan membuat strategi yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dimana ditunjukkan oleh pegawai pemerintah dan lembaga pemerintah maupun swasta. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Penggunaan produk-produk asli daerah atau yang dikenal dengan penggunaan produk dalam negeri sudah merupakan peraturan dari pusat. Peraturan ini diteruskan oleh pemerintah daerah yang dicantumkan dalam Renstra mbak. menurut peraturan pemerintah pusat dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri yaitu ditunjukkan kepada lingkungan instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN dan BUMD serta lembaga pendidikan. Namun untuk lembaga pendidikan yaitu lingkungan sekolah masih belum diterapkan mbak. Ya karena batik yang ada di Pacitan ini tergolong mahal mbak soalnya kan pengusaha batik ini produksinya kebanyakan adalah batik tulis. Oleh sebab itu kita masih mendiskusikan yang nantinya kita rencanakan untuk imbauan kepada para pengusaha batik untuk memproduksi batik cap dan printing sehingga harganya akan murah dan dapat dijangkau oleh sekolah.” *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan)*

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa menurut peraturan pemerintah pusat yang yang dituangkan pada Inpres No.2 Tahun 2009 tentang penggunaan produk dalam negeri, dimana peraturan ini mengacu pada Kepres No.8 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada lingkungan instansi pemerintah. Salah satu potensi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah pada sektor pakaian dan kelengkapan kerja. Pakaian dan kelengkapan kerja meliputi pakaian kerja, sepatu dan aksesoris kerja lainnya harus menggunakan produk berasal dari daerah sendiri diataranya adalah batik Pacitan. Namun penggunaan kain batik masih digunakan pada

seragam kerja pemerintah saja karena harga kain yang masih terlalu tinggi jika digunakan untuk seragam sekolah. Hal ini disebabkan oleh bahan produksi yang masih didatangkan dari luar daerah dan biaya produksinya yang masih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama para produksi batik berencana memproduksi batik dengan cap dan printing. Upaya ini diharapkan dapat menekan harga yang dirasa sangat mahal sehingga masyarakat menengah ke bawah dapat menjangkaunya. Berikut merupakan kain batik tulis menggunakan bahan alami dan sintetis oleh salah satu produksi batik Lorok yaitu batik Tengah Sawah:



Gambar 18. Batik Lorok Tengah Sawah Bahan Alami dan Sintetis

Sumber: Data Primer Hasil Observasi Peneliti, 2017

c. Memperjelas Misi dan Nilai-Nilai Organisasi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Penetapan misi bagi organisasi lebih dari sekedar mempertegas keberadaan organisasi. Penetapan ini bertujuan untuk meminimalisir adanya perbedaan pendapat yang berakibat pada konflik dalam organisasi. Oleh sebab itu, misi harus dapat mewakili tujuan melalui

program dan kegiatan yang selaras dengan Visi yang telah ditetapkan. Misi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur (SDM) Aparatur
2. Meningkatkan Koperasi yang berkualitas
3. Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mandiri
4. Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing
5. Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang tangguh

Penetapan visi dan misi merupakan pedoman dalam pelaksanaan program kerja instansi dan diharapkan dapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh semua usaha mikro di Kabupaten Pacitan termasuk dapat mengembangkan produk unggulannya yaitu batik Lorok Pacitan. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Misi yang terdapat pada Renstra 2011-2016 memuat misi-misi saat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro masih digabung dengan Disperindag ya mbak. Kita masih memakai itu dulu karena dokumen yang baru masih dalam tahap revisi belum bisa kita *share* dulu. Jadi ya kelima Visi tersebut mewakili setiap bidang, ya dari koperasi, UMKM, industri dan juga perdagangan. Namun terdapat satu misi yang menjadi fokus dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang akan kita teruskan di kinerja kita selanjutnya yaitu menciptakan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing. Kita akan mewujudkan usaha mikro yang mandiri dari berdaya saing dalam meningkatkan kemampuan setiap UMKM, menguasai teknologi, meningkatkan SDM, mempermudah akses permodalan, pemasaran dan mampu memanfaatkan sarana usulan dan pemasaran secara baik.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Misi yang tertera pada dokumen Rencana strategis Tahun 2011-2016 merupakan Misi saat masih menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan. Sekarang keduanya

dipisah menjadi dua instansi yang berbeda. Pemisahan instansi dilakukan pada bulan Februari dimana pembentukan Rencana strategis yang baru belum selesai dilakukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih menggunakan Renstra lama. Namun terdapat satu misi yang akan terus dilanjutkan pada kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro selanjutnya yaitu mewujudkan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing yang meliputi meningkatkan kemampuan UMKM, meningkatkan SDM, teknologi pengetahuan, akses permodalan, pemasaran/promosi dan dapat memanfaatkan sarana usulan dan pemasaran yang disediakan dari pemerintah.

d. Menilai Lingkungan Eksternal

Menilai lingkungan eksternal merupakan penilaian pada lingkungan di luar organisasi, dimana penilaian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Faktor-faktor yang menjadi penilaian lingkungan internal merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi, sedangkan faktor pada penilaian lingkungan eksternal tidak dapat dinilai atau tidak dapat dikontrol oleh organisasi. Oleh karena itu, penilaian diluar organisasi atau penilaian lingkungan eksternal akan menghasilkan berbagai peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Sebagai organisasi yang tidak dapat memantau dan mengontrol lingkungan eksternal, harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Berikut hasil wawancara dengan

Bapak Sutrisno selaku Kepala Bagian Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Untuk pengembangan UMKM batik Lorok yang menjadi penghambat adalah harga kain batik Lorok yang masih sangat tinggi dan akses jalan ke tempat produksi yang rusak. Hal ini menyebabkan rendahnya minat pembeli terutama pada masyarakat menengah ke bawah mbak. Hal inilah yang masih terus kita kaji lagi untuk bagaimana batik yang ada di Pacitan ini peminatnya menyeluruh gitu.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa yang menjadi hambatan berupa ancaman yang berasal dari luar organisasi adalah harga jual kain batik yang masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena kain dan bahan-bahan pelengkap pembuatan batik yang masih dikirim dari luar daerah. Oleh sebab itu, pemerintah masih mendalami tentang hambatan dalam pengembangan batik Lorok Pacitan. Selain itu masih banyaknya akses jalan menuju tempat produksi rusak. Adapun beberapa peluang yang dapat dijadikan nilai tambah dalam pengembangan batik Lorok Pacitan diantaranya adalah penggunaan bahan pewarna alami, proses pembuatan yang masih tradisional, setiap motif dan corak memiliki arti dan sejarah yang menarik serta motif dan corak terinspirasi dari hewan dan tumbuh-tumbuhan sekitar. Hal ini didukung dengan pernyataan dari Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Batik Pacitan yang diataranya adalah batik Lorok merupakan batik yang memiliki kekhasan sendiri. Motif dan coraknya menggambarkan kekhasan dari daerah asalnya yaitu Ngadirojo. Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah akan terus berupaya mbak di dalam meningkatkan pengembangannya” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa batik Pacitan yang salah satunya adalah batik Lorok merupakan kain khas Pacitan yang menggambarkan kekayaan sumber daya alam yang masih sangat dijaga oleh leluhur. Hal ini terbukti dari motif batik yang terinspirasi dari hewan dan tumbuhan sekitar. Salah satu motif yang telah dikenal masyarakat luas dan sudah ditetapkan menjadi motif asli Pacitan yaitu motif buah pace yang merupakan buah yang melambangkan asal usul Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai organisasi publik harus dapat memanfaatkan peluang yang ada dan menghadapi ancaman yang terjadi sebagai sebuah peluang baru.

e. Menilai Lingkungan Internal

Penilaian lingkungan internal atau lingkungan di dalam suatu organisasi merupakan penilaian yang digunakan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi yaitu pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan. Organisasi dapat memantau sumberdaya (*inputs*), strategi sekarang (*process*) dan kinerja (*outputs*). Pada penilaian internal terdapat masalah yang sering terjadi disebuah organisasi yaitu mengenai ketidak relatifan mengenai informasi kinerja yang sering menimbulkan masalah baik kepada organisasi maupun kepada *stakeholder* nya. Oleh karena itu, suatu organisasi harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Kekuatan yang dimiliki pertama, kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga swasta lainnya yaitu dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, BUMN PT INKA, PT Telkomsel, lembaga pendidikan yaitu SMKN Pacitan dan PLUT. Kedua, adanya sarana penunjang

pemasaran dan layanan publik adalah adanya Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Gedung Pasar Sawo.

Kelemahan yang berasal dari dalam organisasi yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan adalah dampak dari pemisahan instansi yang berakibat pada kinerja organisasi yang menurun. Berikut wawancara dengan Bapak Sutirno selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Dinas ini kan masih baru mbak baru beberapa bulan masihan, kita juga masih penyesuaian dengan lingkungan yang baru. Gedung kita juga masih *nuntut* dengan gedung PLUT karena belum tersedianya lahan. Hambatannya ya ini mbak, pemisahan ini berdampak sekali untuk kinerja kita karena konsentrasinya kan juga terpecah dengan pelayanan yang harus jalan dan pembuatan struktur organisasi yang baru” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 09.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang terjadi di organisasi yaitu adanya pemisahan instansi antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pemisahan ini berdampak pada kinerja yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, penempatan instansi sementara bersama pendamping PLUT. Hal ini disebabkan karena instansi belum memiliki lahan untuk pembangunan gedung yang baru.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Batik Lorok Pacitan

Pelaksanaan strategi perencanaan pemerintah dalam pengembangan suatu usaha mikro tentu ada faktor pendukung dan penghambat. Di dalam menjalankan setiap perannya, pemerintah selalu memiliki faktor pendukung untuk menunjang keberhasilan programnya. Sedangkan dalam pelaksanaannya pasti terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat menjadi kendala dalam berjalannya program kerja pemerintah. Proses identifikasi faktor pendukung dan penghambat menjadi faktor penting di dalam pengembangan usaha mikro batik Lorok Pacitan. Faktor yang menjadi pendukung dalam pengembangan UMKM salah satunya adalah ketersediaan SDM sebagai pendukung produksi. Sedangkan, faktor penghambat dalam suatu pengembangan UMKM adalah kurangnya promosi dan pemasaran pada semua produk-produk usaha mikro termasuk pada batik lorok Pacitan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan faktor yang dapat memudahkan dalam pengembangan UMKM batik Lorok Pacitan. Faktor pendukung dapat berasal dari dukungan pemerintah kepada suatu badan usaha maupun berasal dari badan usaha sendiri. Faktor pendukung dalam pelaksanaan strategi perencanaan pemerintah dalam pengembangan UMKM batik Lorok Pacitan adalah adanya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha mikro batik Lorok, ketersediaan sumberdaya manusia yang tinggi dan pengolahan limbah yang baik.

1. Internal: Koordinasi Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Batik Lorok

Pusat layanan yang diberikan oleh pemerintah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta pendampingan usaha dari PLUT merupakan koordinasi yang baik yang dilakukan pemerintah kepada badan usaha yang ada di Kabupaten Pacitan, termasuk juga usaha mikro batik Lorok Pacitan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Smito selaku staff Pendamping Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Bentuk koordinasi kita dengan para pengusaha mikro ya dalam bantuan dan pendampingan. Kita membantu mereka jika ada masalah yang perlu diselesaikan, memberikan saran dan solusi agar pengembangan dapat berjalan dengan baik. Ya mulai dari kepengurusan pembuatan usaha sampai nanti pengembangannya. Mereka datang langsung kesini ya memberi tahu ingin membutuhkan apa, masalahnya apa gitu aja mbak. Kita juga membantu Dinas jika ada pelatihan dan sosialisasi untuk para pengusaha. Seharusnya bisa terbantu dengan adanya layanan ini mbak.”
(Hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 10.00 WIB di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT))

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa bentuk koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha adalah adanya layanan dari PLUT. Layanan yang diberikan adalah berupa bantuan dan pendampingan. Selain itu, pusat layanan ini menampung permasalahan yang terjadi pada para pelaku usaha untuk diberikan solusi dan jalan keluar atas masalah yang terjadi.

2. Eksternal: Ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM)

Ketersediaan sumberdaya manusia merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pengembangan suatu usaha mikro. Bentuk dukungan dari tingginya SDM yang ada di batik Lorok adalah dalam jumlah pegawai. Hal ini

sesuai dengan pernyataan dari Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Faktor pendukung untuk pengembangan batik Lorok ya banyaknya jumlah SDM. Hampir semua ibu-ibu disana kerja sampingannya adalah membatik mbak. Soalnya rata-rata kan adalah ibu rumah tangga, jadi ya untuk sampingan mereka dan bisa menambah penghasilan juga. Kalo untuk menambah pegawai itu disana mudah sekali. Disana itu banyak yang jago bikin pola-pola yang bagus padahal pendidikannya juga tidak tinggi. Tapi kemampuannya terus diasah dan dilatih terus-menerus.”
(*Hasil wawancara pada tanggal 7 Mei 2017 pukul 11.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sumiatin selaku pemilik batik Puri Putri sebagai berikut:

”Pegawai disini adalah masyarakat sekitar sini saja mbak, yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga. Kita juga mengajari anak-anak SD untuk menggambar pola. Ya daripada mereka melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat mending kita latih lumayan mbak bisa buat tambah membeli keperluan sekolah. Upah yang diberikan untuk karyawan yang ibu-ibu kalau gambarnya rumit ya satu lembar kain Rp 75.000,- sampai Rp 90.000,- tapi kalau polanya biasa ya Rp 30.000,-. Untuk upah anak-anak SD kita kasih Rp 5.000,- per lembar. Banyak ibu-ibu yang menjadi karyawan karena sebagian besar kan ibu rumah tangga mbak, ya untuk tambah-tambah kebutuhan dan proses mempola dan mencantingnya itu di rumah mbak jadi bisa diambil juga.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 14.00 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri Ngadirojo Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa faktor pendukung dalam pengembangan usaha mikro batik Lorok adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang melimpah. Kebanyakan yang menjadi karyawan adalah para ibu rumah tangga. Para pemilik juga melatih murid SD untuk menggambar pola karena akan menambah kegiatan yang positif. Ketersediaan sumberdaya manusia yang tinggi dibuktikan dengan jumlah pegawai di semua tempat produksi yang mengalami kenaikan dan sebagian besar pegawai adalah masyarakat sekitar

tempat produksi batik Lorok. Adapun tabel jumlah pegawai yang mengalami peningkatan sebagai berikut:

Tabel 8. Jumlah Tenaga Kerja UMKM Batik Lorok Tahun 2014-2016

No	Nama Produksi	Tenaga Kerja		
		2014	2015	2016
1.	Canting Jaya II	59	87	87
2.	Puspita	37	42	42
3.	Puri	130	104	104
4.	Puri Putri	57	55	65
5.	Mira	10	10	10

Sumber: Dokumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa kelima tempat produksi yaitu Canting Jaya II, Puspita, Puri, Puri Putri dan Mira mengalami kenaikan tenaga kerja di tahun 2015. Kenaikan jumlah tenaga kerja dapat menaikkan jumlah produksi dan juga dapat memberdayakan masyarakat setempat. Sebagian dari tenaga kerja di tempat produksi adalah para ibu rumah tangga, dimana para pegawai tidak diikat kontrak maupun perjanjian kerja. Hal ini lebih memudahkan dan meringankan para pegawai untuk bekerja dengan leluasa dan tidak terikat waktu.

b. Faktor Penghambat

1. Internal: Kurangnya Promosi dan Pemasaran

Promosi sangat penting bagi suatu usaha agar dikenal oleh masyarakat luas. Kegiatan promosi merupakan bagian dari strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan khususnya oleh usaha mikro. Strategi promosi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan masih dirasa kurang karena

hanya terdapat dua kegiatan promosi yaitu pameran dan peragaan busana. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sutrisno selaku Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

“Sebenarnya kalau untuk promosi sendiri pemerintah sudah berupaya setiap tahunnya untuk mengadakan *event* tersebut. Tetapi kita juga menyadari ya mbak pameran dan peragaan busana yang diselenggarakan masih belum banyak menarik perhatian masyarakat. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya dukungan dari lembaga pemerintah maupun masyarakat.” (*Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 10.00 WIB di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk batik lorok Pacitan hanya terbatas dua kegiatan saja. Hal ini dirasa masih belum sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu mengenalkan produk batik sebagai salah satu produk unggulan UMKM Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, dibutuhkan lembaga pemerintah lain dan lembaga masyarakat untuk ikut bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dari pemerintah.

2. Eksternal: Tidak Adanya Kelompok Paguyuban Batik Lorok Pacitan

Produksi batik Lorok Pacitan telah berdiri dari puluhan tahun yang lalu. Beberapa pemilik produksi merupakan regenerasi dari pemilik produksi besar di Kecamatan Ngadirojo Pacitan. Saat ini jumlah tempat produksi batik Lorok telah mencapai sepuluh tempat dan tersebar di berbagai desa. Namun dalam pengembangan dan pemasaran masih dilakukan secara individual. Hal ini menyebabkan minimnya akses informasi terkait batik Lorok, pemasaran yang hanya lingkup tertentu dan tingkat kemampuan pengembangan setiap produksi

tidak sama. Permasalahan yang timbul disebabkan karena tidak adanya kelompok atau paguyuban batik Lorok Ngadirojo sebagai wadah aspirasi para pengusaha untuk dapat bertukar informasi terkait pemasaran kemudian menjalin kerjasama antar pengusaha batik sehingga para pengusaha batik ini di dalam penjualan produk bisa lebih luas lagi . Seperti yang disampaikan oleh Bapak Susanto selaku Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

“Kalau kelompok untuk para pemilik batik Lorok belum ada yang berbentuk paguyuban atau wadah yang terstruktur secara manajemen. Hal ini dikarenakan dari awal pembatik di Lorok ini menjualnya secara individu. Kami sebagai fasilitator dapat mendukung untuk perizinan dan sebagainya sebagai bentuk upaya peningkatan produksi atau kualitas kain batik Lorok. Namun sekarang ini yang baru berjalan adalah koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh beberapa pengusaha saja.” *(Hasil wawancara peneliti pada tanggal 3 Juli 2017 pukul 10.00)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa para pengrajin batik yang berada di Kecamatan Ngadirojo Pacitan belum memiliki suatu wadah maupun paguyuban pengusaha batik Lorok. Hal ini dikarenakan dari awal berdiri sudah memproduksi secara individu. Selain itu pemilik beberapa produksi sudah lanjut usia oleh sebab itu belum terciptanya kelompok tersebut. Hal ini dijelaskan kembali oleh Ibu Sumiatin selaku pemilik produksi Puri Putri sebagai berikut:

“Belum ada kok mbak, dulu sih uda ada rencana gitu awalnya masih arisan antar pemilik tapi sekarang tidak berjalan lagi. Kita sih kemaren sudah merencanakan dan kita mau minta tolong ke Dinas spaya bisa disetujui nantinya. Kalau untuk koperasi simpan pinjam itu yang punya Canting Jaya mbak, tapi bukan untuk pengrajin batik tapi untuk umum sih setau saya” *(Hasil wawancara pada tanggal 8 Mei 2017 pukul 14.00 WIB di Tempat Produksi Batik Lorok Puri Putri Ngadirojo Pacitan)*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pendirian kelompok atau paguyuban masih dalam tahap rencana yang nantinya akan

dibicarakan untuk dapat disetujui oleh pemerintah daerah melalui Dinas terkait yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan juga Dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pembentukan suatu kelompok atau paguyuban dari batik Lorok ini penting dilakukan karena tidak adanya akses informasi yang memadahi untuk para konsumen. Informasi tersebut dapat berupa cara pemesanan, tempat produksi, tempat pemasaran dan juga dapat digunakan dalam bertukar informasi antar pengusaha dan konsumen. Selain itu, dengan adanya suatu wadah perkumpulan atau paguyuban dapat tersusun struktur manajemen yang jelas dimana akan membantu para pengusaha dalam pengajuan modal, pemasaran ke berbagai tempat dan acara serta dapat membantu para produksi yang masih kecil.

E. Pembahasan

1. Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Batik Lorok Pacitan

Perencanaan dalam pembangunan Indonesia telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 1 ayat 1. Di dalamnya menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, berdasarkan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pada hakikatnya suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada strategi terdahulu. Sesuai dengan pendapat Kusdi (2099: 87) bahwa suatu strategi merupakan penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi yang dilanjutkan dengan penetapan

rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran yang ingin dicapai.

Perencanaan strategi di dalam suatu organisasi publik atau suatu SKPD mengacu pada dokumen Rencana strategi (Renstra). Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang pada tahun lalu masih sebagai Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan merumuskan enam strategi sebagai acuan dalam pembentukan kebijakan, sasaran dan program kerja. Keenam strategi tersebut diantaranya adalah rencana peningkatan perlindungan konsumen, rencana penggunaan produk dalam negeri, rencana peningkatan SDM, teknologi pengetahuan, akses permodalan dan pemasaran, rencana pengembangan SDM Aparatur dan rencana pengembangan sarana usulan dan pemasaran. Keenam point Rencana strategis tersebut dikomparasikan dengan teori proses perencanaan strategi menurut Bryson dalam Fakhri Mansour (2007: 56).

Penilaian tersebut didasarkan pada pengertian dari setiap proses perencanaan strategi kemudian dianalisis strategi mana yang termasuk ke dalam proses perencanaan strategi. Setelah dilakukan analisis dapat diketahui bahwa terdapat lima proses perencanaan strategi yang dapat disesuaikan dengan Rencana strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yaitu memrakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis yang terdiri dari rencana pengembangan kemampuan koperasi dan UMKM dan rencana peningkatan SDM, teknologi pengetahuan, akses permodalan dan pemasaran serta rencana pengembangan sarana usulan dan pemasaran. Memperjelas mandat organisasi terdiri dari rencana meningkatkan perlindungan konsumen dan rencana

peningkatan produk dalam negeri. Kemudian selanjutnya adalah memperjelas Misi dan nilai-nilai organisasi, menilai lingkungan eksternal dan menilai lingkungan internal.

a. Memrakarsai dan Menyepakati Proses Perencanaan Strategis

Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis merupakan proses pertama dalam delapan langkah perencanaan strategis menurut Bryson dalam Fakhri Mansour (2007: 56). Tujuannya adalah dapat menyepakati kebijakan maupun arah pembangunan khususnya pada pengembangan UMKM batik Lorok dengan pihak-pihak penting dalam pembuatan keputusan. Proses pengembangan dalam meningkatkan kualitas UMKM adalah adanya kerjasama dengan instansi lain yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, PT INKA Indonesia, PT Telkomsel dan lembaga pendidikan yaitu SMKN 1 Pacitan.

1. Pengembangan Kemampuan UMKM

Pengembangan kemampuan UMKM pada setiap produk dilakukan oleh pemerintah sebagai suatu strategi untuk mencapai tujuan pemerintah daerah yaitu meningkatkan kemampuan bagi masing-masing usaha mikro. Peningkatan kemampuan pada usaha mikro dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sebagai lingkungan internal dan masing-masing badan usaha sebagai lingkungan eksternal. Hal ini harus dilakukan agar tercipta sinergitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti yang diungkapkan oleh Amirullah (2003: 4) strategi sebagai suatu tujuan, dimana rencana dalam mencapai tujuan tersebut sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal.

Peningkatan dalam pengembangan kemampuan produk dilakukan mulai dari kemudahan administrasi berupa legalitas dan izin usaha sampai pada pengembangan inovasi. Hal ini berdasarkan pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui berbagai peraturan dan kebijakan, salah satunya pada aspek perizinan usaha. Pencapaian pada pengembangan dari UMKM batik Lorok telah mencapai pada tahap inovasi produk. Beberapa pengusaha bekerjasama membuat inovasi tas dari bahan batik Lorok. Inovasi ini dilakukan agar dapat memberikan pilihan pada konsumen sehingga tercapainya pembaharuan produk dan memiliki nilai lebih bagi konsumen. Seperti yang di ungkapkan oleh Pamudji (1985: 7) pengembangan adalah suatu pembangunan yaitu untuk merubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Makna dari pembaharuan adalah melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu untuk menjadi lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan, menjadi lebih baik dan bermanfaat.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Suatu peningkatan kemampuan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM). Sesuai dengan pendapat Kartasmita (1996:5) bahwa pengembangan UMKM meliputi beberapa aspek salah satunya adalah pelatihan tentang penguatan dan ketrampilan. Program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan pelatihan dan ketrampilan adalah dengan meningkatkan lapangan kerja melalui produk unggulan yaitu batik Lorok. Semboyan program kerja dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) adalah “Tidak Ada Menjadi Ada”.

Program ini ditujukan kepada desa-desa yang menjadi sasaran pemerintah untuk diberi pelatihan agar nantinya tercipta pengusaha-pengusaha batik yang baru.

3. Peningkatan Teknologi Pengetahuan

Perkembangan teknologi yang semakin canggih berpengaruh terhadap kecakapan pelaku usaha dalam penggunaan teknologi pengetahuan. Sesuai dengan pendapat Kartasmita (1996: 5) bahwa salah satu pengembangan UMKM adalah meningkatkan aspek teknologi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memberikan sosialisasi dan pelatihan. Penyelenggaraan masih terbatas meskipun pemerintah telah bekerja sama dengan PT Telkomsel namun belum bisa dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasara.

4. Akses Permodalan

Akses permodalan merupakan salah satu aspek mendasar untuk memulai suatu usaha kecil dan mikro. Oleh sebab itu, pemerintah membuka lebar bantuan bagi usaha yang akan mengakses bantuan permodalan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang pasal 7 Nomor 20 Tahun 2008 dimana dalam mewujudkan iklim usaha yang baik pemerintah harus mengupayakan melalui berbagai peraturan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan dan kemitraan. Bantuan permodalan yang disediakan oleh pemerintah adalah bantuan pemerintah daerah melalui APBD. Kemudian pemerintah juga bermitra dengan PT INKA yang dapat memberikan bantuan modal dengan syarat yang mudah dan adanya pinjaman dari bank-bank negeri maupun swasta.

5. Pemasaran/Promosi

Pada pemasaran dan promosi merupakan tujuan akhir dari suatu proses usaha. Pemasaran merupakan penentu suatu produk dapat diterima atau tidak oleh konsumen. Berdasarkan Undang-Undang pasal 7 Nomor 20 Tahun 2008 bahwa promosi dan pemasaran terdapat pada point tujuh sebagai aspek yang harus diupayakan peningkatannya oleh pemerintah. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerjasama dengan lembaga pendidikan yaitu SMKN Pacitan dalam melakukan kegiatan peragaan busana dengan tema Melestarikan Batik Pacitan. Promosi yang dilakukan melalui kegiatan peragaan busana bertujuan untuk lebih menarik masyarakat agar lebih mengenal batik-batik yang ada di Pacitan salah satunya adalah batik Lorok.

6. Pengembangan Sarana Usulan dan Pemasaran

Pengadaan suatu sarana usulan bagi pelaku usaha bertujuan agar para pelaku usaha kecil dan mikro memiliki suatu tempat pelayanan yang bisa membantu dalam pengembangan maupun mengatasi suatu masalah atau kendala. Sarana usulan dan pemasaran disediakan dari pemerintah sebagai upaya mengatasi dan meminimalisasi permasalahan yang timbul pada suatu badan usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam aspek pengembangan sarana dan pemasaran menunjukkan adanya perubahan kearah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya para pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Siagian dalam Tjokroamidjojo (1986: 13) bahwa administrasi pembangunan merupakan keseluruhan proses pelaksanaan dari rangkaian kegiatan yang bersifat

pertumbuhan dan perubahan yang terencana menuju modernitas dalam berbagai aspek kehidupan bangsa.

Kegiatan yang menunjukkan suatu pertumbuhan dan perubahan dalam pengembangan sarana usulan adalah adanya pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) oleh pemerintah daerah guna memberikan akses yang mudah bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan pengembangan usahanya. Sedangkan pada sarana pemasaran pemerintah juga telah membangun pasar yang digunakan untuk memberikan sarana bagi usaha-usaha mikro dapat memasarkan usahanya. Namun pada pelaksanaannya kedua sarana usulan dan pemasaran tersebut terkendala oleh konsistensi dari pengurusnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dari pengurus dan penanggung jawab. Permasalahan tersebut timbul dikarenakan kurangnya peran dari suatu manajemen strategi. Seperti yang dijelaskan oleh Susanto (2014: 2) bahwa manajemen strategi memiliki peran yang penting diantaranya adalah membantu menangani ketidakpastian melalui suatu pendekatan yang sistematis, menjadi sarana komunikasi jangka panjang dan acuan bagi dewan direksi

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan peningkatan sarana usulan dan sarana pemasaran sebaiknya melakukan pendekatan secara manajemen strategi seperti penentuan tujuan, pembenahan peran setiap anggota organisasi agar pembangunan fasilitas dari pemerintah dapat terus dilakukan dan dirasakan dampaknya bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, adanya manajemen strategi yang baik dapat menjadikan acuan bagi pembentukan rencana jangka pendek maupun

rencana jangka panjang. Hal ini sebaiknya dilakukan pada setiap organisasi dan adanya peran aktif dari para pengusaha mikro. Batik Lorok sebagai produk unggulan UMKM Kabupaten Pacitan dinilai masih belum terlibat banyak dalam pelaksanaan pasar produk UKM.

b. Memperjelas Mandat Organisasi

Pembentukan rencana strategi suatu SKPD selain digunakan dalam merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran juga digunakan dalam memperjelas kewajiban dan batasan dalam pembagian kinerja. Kewajiban dalam suatu pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu mandat atau tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan proses perencanaan strategis menurut Bryson dalam Fakhri Mansour (2007: 55) yang kedua bahwa suatu mandat menjadi pembatas atas apa yang harus dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan suatu organisasi, sehingga tidak akan terjadi pembagian tugas yang sama.

1. Meningkatkan Perlindungan Konsumen

Pemerintah memiliki tugas penting dalam melindungi masyarakatnya. Menurut Smith dalam Muluk (2009: 11) menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tugas melindungi masyarakat dari pelanggaran invasi masyarakat dari ketidakadilan atau tekanan dari anggota masyarakat lainnya, serta bertugas menegakkan administrasi keadilan secara pasti. Artinya bahwa peningkatan perlindungan konsumen menjadi tugas dari pemerintah dalam melindungi masyarakat dari produk-produk UMKM yang berbahaya dan tidak layak konsumsi. Jika terjadi adanya pelanggaran maka pemerintah daerah berhak memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada.

Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan di dalam melaksanakan perlindungan konsumen yaitu dengan pengawasan dan pengecekan kualitas bahan pada produk UMKM salah satunya adalah batik Lorok. Perlindungan yang dilakukan pada batik Lorok berupa pemilihan bahan yang aman untuk dipakai dan tidak berbahaya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan dan memberikan rasa aman bagi konsumen dalam membeli produk UMKM batik Lorok Pacitan.

2. Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat dilakukan dengan adanya suatu aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai bentuk dukungan dalam pelaksanaan peningkatan penggunaan produk-produk asli daerah. Aturan yang dibuat oleh pemerintah dapat memberikan dampak bagi masyarakat agar semua lapisan masyarakat ikut melestarikan produk-produk dalam negeri salah satunya adalah ikut membeli produk-produk asli daerah. Menurut Howleet dan Ramesh dalam Muluk (2009: 114) peran pemerintah dibedakan menjadi tiga kategori, salah satunya adalah instrumen wajib (*compulsory instrument*). Pada instrumen wajib, pemerintah daerah bertugas mengarahkan tindakan warga dan lembaga swasta untuk lebih mempergunakan otoritasnya dalam mengatur atau memerintahkan warga untuk melakukan tindakan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah mengeluarkan peraturan penggunaan produk asli daerah untuk menjadikan produk daerah unggulan di daerah sendiri.

Salah satu produk Kabupaten Pacitan yang harus didukung oleh pemerintah maupun masyarakat adalah dengan penggunaan batik Lorok dan batik

Pacitan lainnya. Tindakan yang digunakan pemerintah dalam hal peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah dengan peraturan penggunaan batik Pacitan termasuk adalah batik Lorok untuk digunakan pada pegawai pemerintahan pada dua hari dalam satu minggu, pada pekan Swadesi dan pada saat acara-acara penting lainnya. Pemberlakuan peraturan tersebut mengacu pada Inpres Nomor 2 Tahun 2009 Tentang penggunaan produk dalam negeri, dimana Inpres tersebut mengacu pada Keppres Nomor 8 Tahun 2003 Tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan secara maksimal.

c. Memperjelas Misi dan Nilai-Nilai Organisasi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi organisasi. Penentuan suatu misi organisasi merupakan proses dari manajemen strategi. Menurut Pearce II dan Robinson yang dikutip oleh Susanto (2014: 4) mengemukakan tujuan penting dari manajemen startegis, salah satunya yaitu merumuskan misi perusahaan atau organisasi, termasuk pernyataan umum tentang tujuan , filosofi dan sasaran. Oleh sebab itu, suatu misi menjadi proses utama dalam menentukan tujuan organisasi pemerintahan.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki lima misi untuk kinerja tahun 2011-2016, yaitu: 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya (SDM) Aparatu, 2) Meningkatkan Koperasi yang berkualitas, 3) Meningkatkan usaha mikro dan menengah yang mandiri, 4) meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing, 5) Mewujudkan industri kecil dan menengah yang tangguh. Salah satu yang menjadi fokus utama dalam pengembangan usaha mikro batik lorok adalah

meningkatkan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan dengan penguatan permodalan, pelatihan, promosi dan pemasaran.

d. Menilai Lingkungan Eksternal

Menilai lingkungan eksternal merupakan penilaian pada lingkungan di luar organisasi, dimana penilaian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Faktor-faktor yang menjadi penilaian lingkungan internal merupakan faktor yang dikontrol oleh organisasi, sedangkan faktor pada penilaian lingkungan eksternal tidak dapat dinilai atau tidak dapat dikontrol oleh organisasi Bryson (dalam Fakhri Mansour, 2007: 62). Oleh karena itu, penilaian diluar organisasi atau penilaian lingkungan eksternal akan menghasilkan berbagai peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman dapat diketahui dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Beberapa peluang dalam pengembangan batik lorok Pacitan adalah penggunaan bahan pewarna alami, proses pembuatan yang masih tradisional, motif dan corak yang memiliki arti dan sejarah yang menarik serta motif dan corak yang terinspirasi dari hewan, tumbuh-tumbuhan serta terinspirasi dari berbagai kearifan lokal. Kemudian untuk ancaman yang berasal dari luar organisasi adalah tingginya harga jual batik lorok dibanding dengan batik Pacitan lainnya seperti batik saji maupun batik Pacitan. Sebagai organisasi yang tidak dapat memantau dan mengontrol lingkungan eksternal, organisasi harus dapat menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Penilaian lingkungan eksternal pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang meliputi

kekuatan adalah adanya kerjasama dengan instansi lain, BUMN dan swasta. Kemudian ancaman yang menghambat pengembangan UMKM batik Lorok adalah harga jual kain yang masih tinggi.

e. Menilai Lingkungan Internal

Penilaian pada lingkungan internal menurut Bryson dalam Fakhri Mansour (2007:63) dalam proses perencanaan strategis langkah kelima, dapat mengidentifikasi adanya kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, pemantauan sumberdaya (*inputs*), strategi sekarang (*process*), dan kinerja (*outputs*). Pada penilaian internal terdapat masalah yang sering terjadi di sebuah organisasi yaitu mengenai ketidak relifan mengenai informasi kinerja yang sering menimbulkan masalah baik kepada organisasi maupun kepada *stakeholder* nya. Oleh karena itu, suatu organisasi harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Terdapat beberapa kekuatan yang dimiliki pertama, adanya kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan, swasta dan lembaga pendidikan. Pada pengembangan usaha mikro batik lorok, pemerintah daerah bekerja sama dengan BUMN PT. INKA Indonesia dalam bidang permodalan, kemudian adanya penyelenggaraan kegiatan peragaan busana yang bekerja sama dengan sekolah kejuruan SMKN Pacitan dalam bidang promosi dan pemasaran serta kerjasama dengan Telkomsel dalam pelatihan penggunaan komputer dan internet sebagai media promosi dan pemasaran.

Penilaian internal yang berupa kelemahan terjadi dalam Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah diberlakukannya pemisahan instansi yang berakibat pada

kinerja yang kurang maksimal. Hal ini berdampak pada pelayanan dan belum berjalannya program-program kerja dalam pengembangan usaha mikro batik lorok. Oleh sebab itu, di dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran harus tercipta adanya kerja sama yang baik mulai dari staff sampai kepala atau kedudukan paling tinggi. Berdasarkan hal tersebut, sumberdaya aparatur seharusnya dapat melaksanakan tugasnya masing-masing agar kerjasama bawahan dan atasan dapat terlaksana dengan baik. Sesuai dengan pendapat Susanto (2014: 4) bahwa salah satu tugas penting dari manajemen strategis adalah menerapkan pilihan-pilihan strategis melalui pengalokasian sumberdaya yang dianggarkan, dimana kesesuaian tugas-tugas, karyawan, struktur, teknologi dan sistem imbalan ditekankan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Batik Lorok Pacitan

Pengembangan dari suatu UMKM tentu terdapat adanya faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengidentifikasian pada faktor-faktor tersebut digunakan sebagai acuan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dalam mengembangkan usaha-usaha mikro yang ada khususnya adalah pengembangan pada batik Lorok Pacitan. Faktor pendukung dari pengembangan UMKM batik Lorok adalah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha dan juga adanya ketersediaan SDM. Sedangkan faktor penghambat dalam pengembangan UMKM batik Lorok adalah terbatasnya bantuan pemerintah dan tidak adanya kelompok paguyuban batik Lorok Pacitan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung merupakan salah satu pendukung dalam pelaksanaan pengembangan batik Lorok dimana pada pengembangannya harus dapat didukung oleh pemerintah dan para pelaku usaha batik. Faktor pendukung pada lingkungan internal adalah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha batik Lorok serta ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM).

1. Internal: Koordinasi Antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Batik Lorok

Pengembangan dari suatu UMKM harus didukung oleh adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha. Pemerintah daerah berperan sebagai pembuat kebijakan, fasilitator dan penyedia pelayanan sedangkan para pelaku usaha sebagai pelaksana dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Blakely dalam Kuncoro (2004: 113) bahwa dalam pembangunan ekonomi di daerah peran pemerintah mencakup beberapa hal seperti wirausaha, koordinasi, fasilitator dan simulator. Hal tersebut memperjelas bahwa perekonomian daerah yang mencakup usaha kecil dan menengah merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha dalam pengembangan suatu UMKM. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM yang menjelaskan tentang kriteria dan klasifikasi UMKM, batik Lorok masuk pada wilayah usaha mikro. Hal ini karena tempat-tempat produksi batik lorok memiliki omset rata-rata Rp 80.000.000- Rp 100.000.000 dengan tenaga kerja antara 30-60 orang.

Bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dengan para pelaku usaha batik Lorok yaitu dengan adanya pusat layanan yang telah disediakan pemerintah. Pusat pelayanan tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha yang digunakan untuk pusat pengaduan atau permohonan bantuan. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi antara kedua aktor dapat berjalan dengan baik.

2. Eksternal: Ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM)

Ketersediaan suatu sumberdaya manusia yang melimpah merupakan salah satu faktor yang mendukung pengembangan usaha mikro batik Lorok. Tempat produksi dari batik Lorok berlokasi di beberapa desa yang jauh dari pusat kota Kabupaten Pacitan. Hal ini menyebabkan banyaknya sumberdaya manusia sebagai pekerja di masing-masing tempat produksi karena tidak banyak masyarakat desa sekitar yang memiliki pekerjaan yang tetap. Hampir seluruh pegawai tetap maupun pegawai lepas merupakan ibu rumah tangga dan anak-anak kecil. Secara tidak langsung keberadaan dari UMKM batik Lorok menjadi peluang kerja bagi ibu-ibu rumah tangga untuk menambah penghasilannya. Sejalan dengan hal tersebut yang sesuai dengan pendapat Kuncoro (2009: 326) bahwa pengembangan suatu UMKM dilandasi oleh tiga hal salah satunya adalah UMKM intensif dalam menggunakan sumberdaya alam lokal, menyerap tenaga kerja, penggunaan jumlah kemiskinan, pemerataan dalam distribusi pendapatan, dan pengembangan ekonomi di pedesaan. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha mikro batik Lorok dapat membantu dalam penyerapan

tenaga kerja dimana di desa sumberdaya manusianya yang melimpah sehingga membantu meningkatkan perekonomian di pedesaan.

b. Faktor Penghambat

1. Internal: Kurangnya Promosi dan Pemasaran

Salah satu bentuk dukungan dari pemerintah dalam pengembangan usaha mikro adalah promosi dan pemasaran. Namun pada pelaksanaannya, pemerintah masih kurang dalam mempromosikan produk-produk usaha mikro. Oleh karena itu, batik lorok sebagai salah satu produk unggulan belum bisa menjadi produk yang digemari oleh masyarakat. Hal tersebut bertentangan dengan isi pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bahwa salah satu pendekatan utama dalam pengembangan UMKM adalah adanya penciptaan iklim usaha. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam penciptaan iklim usaha adalah pendanaan, kemitraan dan dukungan kelembagaan. Hal ini juga disampaikan oleh Kartasasmita (1996: 5) bahwa pengembangan suatu UMKM meliputi beberapa aspek salah satunya adalah peningkatan akses pasar. Peningkatan akses pasar, yaitu meliputi suatu spectru kegiatan yang luas, mulai dari pecadangan usaha hingga informasi pasar, bantuan produksi serta sarana dan prasarana pemasaran. Khususnya bagi usaha kecil di pedesaan, serta sarana dan prasarana mendasar akan sangat membantu yaitu sarana perhubungan.

Berdasarkan teori tersebut dapat dijelaskan bahwa promosi dan pemasaran merupakan sarana dalam mengenalkan suatu produk kepada masyarakat luas dan membantu para pengusaha mendapatkan jaringan pemasaran yang lebih luas. Hal

inilah yang masih menjadi faktor penghambat bagi usaha-usaha mikro yang ada di Kabupaten Pacitan termasuk usaha mikro batik lorok, dimana pemerintah hanya menyediakan pemasaran berupa pameran sekali dalam satu tahun yang menyebabkan pengusaha kurang mendapatkan jaringan untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, perlu ditambah kembali acara-acara yang berhubungan dengan usaha-usaha mikro sebagai sarana pemasaran, pengenalan produk dan penghubung antara pengusaha dengan jaringan pemasar lainnya atau investor sehingga usaha mikro yang ada di Kabupaten Pacitan mendapatkan kesempatan memasarkan usahanya lebih luas lagi.

2. Eksternal: Tidak Adanya Kelompok Paguyuban Batik Lorok Pacitan

Produksi batik Lorok yang tersebar di beberapa desa mengakibatkan kurangnya akses informasi terkait pemasaran dan lokasi produksi. Para pelaku usaha hanya mengandalkan pemasaran secara individual mengakibatkan tingkat pemasaran dan promosi yang tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kelompok atau paguyuban yang dibina langsung oleh pemerintah sehingga menjadi kelompok yang terorganisir dan terstruktur. Pembentukan suatu kelompok pengrajin diharapkan dapat membantu pelaku usaha yang masih baru dan belum berjalan dengan baik untuk bisa memaskan usahanya bersama. Selain itu, para pengrajin dapat bertukar informasi dan dapat bekerja sama dalam pemasaran di berbagai acara. Pembentukan paguyuban selain berfungsi sebagai wadah informasi juga dapat digunakan sebagai suatu organisasi yang terstruktur dan memiliki strategi untuk kedepannya. Paguyuban ini dapat dikategorikan dalam tipe strategi menurut Kooten dalam Salusu (2004: 104) yaitu

Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya). Dalam hal ini, strategi sumber daya lebih memfokuskan perhatian untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kerja, kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keunganan dan sebagainya.